



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

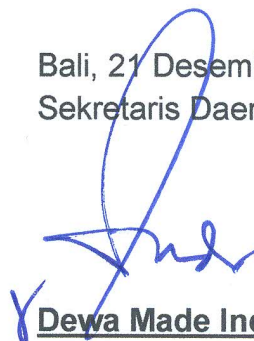
Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Bali dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai dokumen dalam memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna, walaupun telah berupaya untuk menampung berbagai pemikiran, masukan serta saran-saran dari berbagai pihak, namun masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan bahan penyempurnaan.

Bali, 21 Desember 2022
Sekretaris Daerah Provinsi Bali



Dewa Made Indra

NIP. 19670203 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4 KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA DALAM PERENCANAAN DAERAH 4

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI 8

2.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI 8

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH 12

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 21

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 24

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI 26

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 26

3.2 ISU-ISU STRATEGIS 29

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 31

4.1 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 31

4.1.1 Tujuan dan Sasaran 31

4.1.2 Cascading 35

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 36

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 40

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 57

7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 57

BAB VIII PENUTUP 62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 5 September tahun 2023, berakhir pula periode Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional Tahun 2024, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menginstruksikan agar Pemerintahan Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, yang mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 telah memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Program Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2025. Demikian dalam penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 didasarkan pada Visi Misi RPJPD Provinsi Bali. Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.



1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1.1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Sistem Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 1.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 1.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 1.5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 1.6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);
- 1.7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hak cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



- 1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 1.9 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 1.10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 1.11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 1.13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 1.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor T447);
- 1.16 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rrencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
- 1.17 Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan rencana program, kegiatan dan anggaran serta Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 adalah :

- 1.1 Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan/atau Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
- 1.2 Sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan Penganggaran Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
- 1.3 Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpaduan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

1.4 Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024, yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk Menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 serta meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026.

RENSTRA Sekretariat Daerah bersama Renstra Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh RPD 2024-2026. RENSTRA SETDA mengandung Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, sehingga RENSTRA ini berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Pembangun Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah Mengemukakan secara ringkas keterkaitan peranan Renstra Perangkat Daerah dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian Program Prioritas Sekretariat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Perangkat Daerah. Uraian tentang Struktur Organisasi, jumlah personil dan Tata Laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur dan mekanisme).



2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan Sasaran/Target Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan Sekretariat Daerah dan/atau indikator lainnya SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Memuat hal-hal berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

2.5 Anggaran Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah

Bagian ini menyajikan informasi anggaran, belanja dan pembiayaan basis kas untuk periode tertentu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Isu-Isu Strategis

Pada Bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

- Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026.
- Norma, Standar, Prosedur, dan Kinerja (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan Daerah.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Pada bagian ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 jangka Menengah Sekretaris Daerah.



BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI menguraikan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu (Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini memuat penentuan target pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja utama (IKU) dan memuat target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Sekretariat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, Lembaga Lain, dan Staf Ahli Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah mempunyai Tujuan Strategis yaitu “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Dalam Memberikan Layanan Publik yang Berkualitas” yang didukung oleh 9 (Sembilan) indikator diantaranya:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi;
- 3) Indeks Kepuasan Pelayanan masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
- 4) Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 5) Indeks Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 7) Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali;
- 8) Level Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
- 9) Pencapaian MCP Pencegahan Korupsi;

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - A. Kepala Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a). Bagian Kerjasama, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Kerjasama Antar Daerah Dan Pihak Ketiga;
 - 2) Unit Substansi Kerjasama Daerah Dengan Badan Usaha/Swasta; dan
 - 3) Unit Substansi Kerja Sama Luar Negeri.
 - b) Substansi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Fasilitas Administrasi Kepala Daerah Dan DPRD
 - 2) Unit Substansi Administrasi Pemerintahan Dan Fasilitas Penataan Wilayah; dan



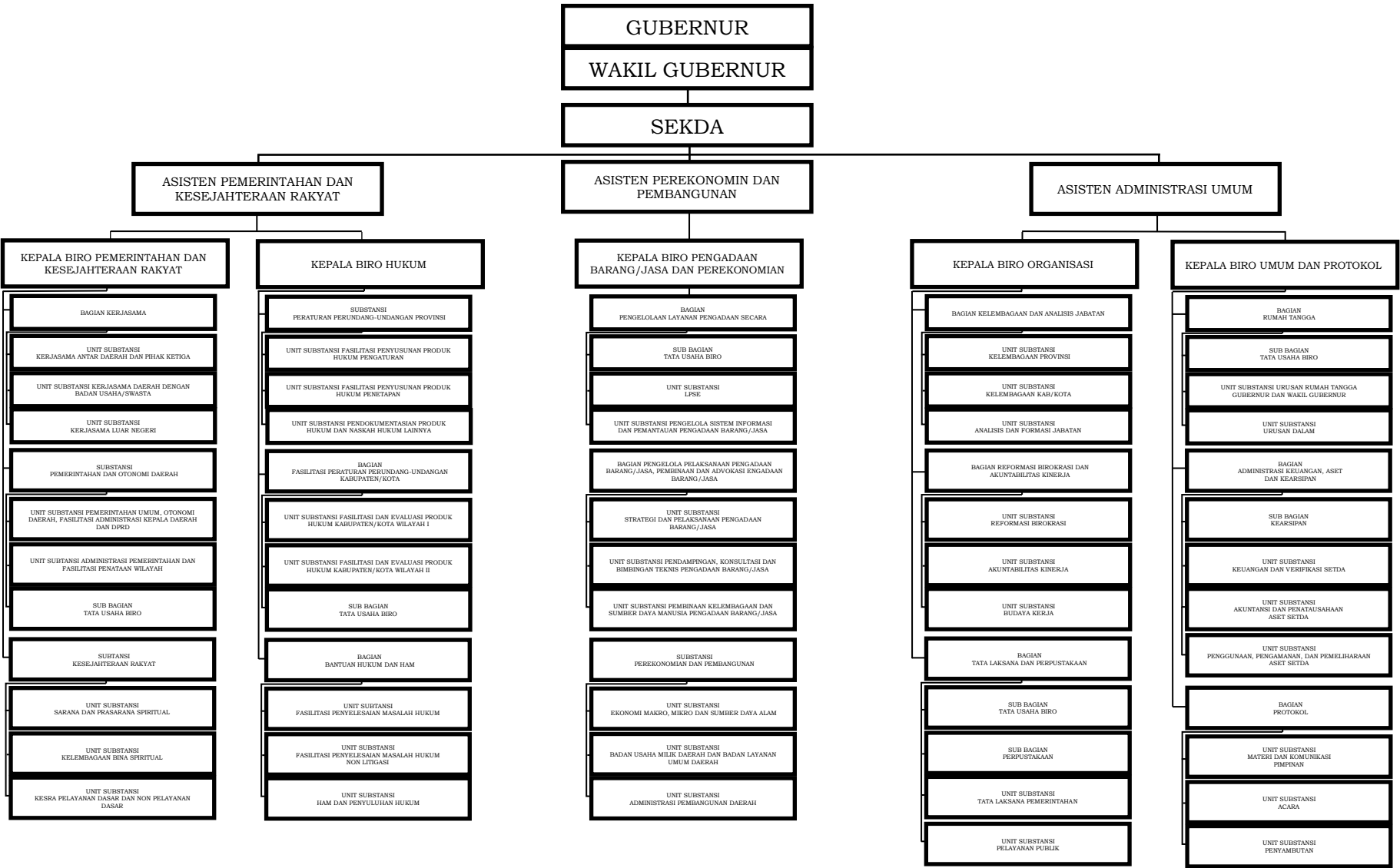
- 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- c) Substansi Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Sarana dan Prasarana Spiritual
 - 2) Unit Substansi Kelembagaan Bina Spiritual; dan
 - 3) Unit Substansi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.
- B. Biro Hukum, terdiri dari :
 - a) Substansi Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 - 2) Unit Substansi Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
 - 3) Unit Substansi pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.
 - b) Bagian Fasilitas Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/ Kota, membawahi:
 - 1) Unit Substansi Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota Wilayah I;
 - 2) Unit Substansi Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota Wilayah II; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - c) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Fasilitas Penyelesaian Masalah hukum;
 - 2) Unit Substansi Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum Non Litigasi; dan
 - 3) Unit Substansi HAM dan Penyuluhan Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - A. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - 2) Unit Substansi LPSE; dan
 - 3) Unit Substansi Pengelola Sistem Informasi dan Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa.
 - b) Bagian Pengelola Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa membawahi :
 - 1) Unit Substansi Strategi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Unit Substansi Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) Unit Substansi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
 - c) Substansi Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Ekonomi Makro, Mikro dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Unit Substansi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - 3) Unit Substansi Administrasi Pembangunan Daerah.



4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - A. Biro Organisasi, terdiri dari :
 - a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Kelembagaan Provinsi;
 - 2) Unit Substansi Kelembagaan Kabupaten/ Kota; dan
 - 3) Unit Substansi Analisis dan Formasi Jabatan.
 - b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Reformasi Birokrasi;
 - 2) Unit Substansi Akuntabilitas Kinerja; dan
 - 3) Unit Substansi Budaya Kerja.
 - c) Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - 2) Sub Bagian Perpustakaan;
 - 3) Unit Substansi Tata Laksana Pemerintahan; dan
 - 4) Unit Substansi Pelayanan Publik.
 - B. Biro Umum dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Bagian Rumah Tangga, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - 2) Unit Substansi Urusan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - 3) Unit Substansi Urusan Dalam.
 - b) Bagian Administrasi Keuangan, Aset dan Kearsipan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kearsipan
 - 2) Unit Substansi Keuangan dan Verifikasi Setda;
 - 3) Unit Substansi Akuntansi dan Penatausahaan Aset Setda; dan
 - 4) Unit Substansi Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset Setda.
 - c) Bagian Protokol, membawahi :
 - 1) Unit Substansi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
 - 2) Unit Substansi Acara; dan
 - 3) Unit Substansi Penyambutan

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali





2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat Daerah, yaitu keberadaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Sekretariat Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Sekretariat Daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerja secara lebih baik.

Untuk Menunjang pelaksanaan tugas. Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki pegawai sebanyak 911 orang. Disamping potensi-potensi positif yang dimiliki SDM, juga didapatkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu ; a) SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuanb dan sasaran organisasi; b) pola pembinaan pegawai sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi; c) penerapan sistem manajemen sumber daya manusia masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Sekretraiat Daerah Provinsi Bali

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
PNS		
1	Sekretaris Daerah	1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	1
3	Asisten Perekonomian dan Ad. Pemerintahan	1
4	Asisten Adminstrasi Umum	1
5	Staf Ahli	3
6	Kepala Biro	5
7	Kepala Bagian	13
8	Kepala Sub Bagian / Sub Koordinator	25
9	Staf	319
NON PNS		
10	Tenaga Bantuan (Kontrak)	570
	JUMLAH	939



Tabel 2.2
Komposisi PNS Sekretariat Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV	75
2	III	243
3	II	43
4	I	1
TOTAL		362

Tabel 2.3
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)
1	I	1
2	II	12
3	III	13
4	IV	25
5	Staf	319
TOTAL		362

Tabel 2.4
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERSEN
1	S3	2	1%
2	S2	95	26%
3	S1	191	53%
4	D3	11	3%
5	SMA/SMK	60	17%
6	SMP	2	1%
7	SD	1	0%
TOTAL		362	100%



Tabel 2.5
Komposisi Non ASN Sekretariat Daerah Provinsi Bali

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERSEN
1	S3	0	0%
2	S2	17	3%
3	S1	240	44%
4	D3	22	4%
5	SMA/SMK	247	45%
6	SMP	15	3%
7	SD	9	2%
TOTAL		570	100%

Tabel. 2.6
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bali

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
1	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	Unit	Baik	48
2	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	Baik	134
3	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	Unit	Baik	60
4	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	Unit	Baik	15
5	1.3.2.05.002.006.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Unit	Baik	3
6	1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	Unit	Baik	7
7	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	Unit	Baik	1
8	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	Unit	Baik	71
9	1.3.2.02.001.002.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	Baik	11
10	1.3.2.02.001.001.002	Jeep	Unit	Baik	1
11	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	Unit	Baik	62
12	1.3.2.05.002.001.013	Meja Podium	Buah	Baik	6



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
13	1.3.2.02.001.002.001	Bus (Penumpang 30 Orang)	Unit	Baik	3
14	1.3.2.02.001.002.002	Micro Bus (Penumpang 15)	Buah	Baik	4
15	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Buah	Baik	108
16	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	Buah	Baik	12
17	1.3.2.05.002.006.013	Megaphone	Buah	Baik	1
18	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	Buah	Baik	141
19	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	Buah	Baik	9
20	1.3.2.05.002.006.020	Stabilisator	Unit	Baik	1
21	1.3.2.05.002.007.001	Alat Pemadam/Portable	Unit	Baik	9
22	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	Buah	Baik	4
23	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	Buah	Baik	4
24	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telephone	Buah	Baik	21
25	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	Unit	Baik	14
26	1.3.2.05.002.006.027	Alat Hiasan	Buah	Baik	3
27	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Buah	Baik	97
28	1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	Baik	4
29	1.3.2.05.002.001.012	Meja Telepon	Unit	Baik	14
30	1.3.2.05.003.002.011	Meja Tamu Biasa	Unit	Baik	9



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
31	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	Unit	Baik	216
32	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachmen	Unit	Baik	1
33	1.3.2.05.001.004.004	Rak Kayu	Unit	Baik	99
34	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	Unit	Baik	51
35	1.3.2.05.002.003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	Baik	2
36	1.3.2.05.002.004.007	Exhause Fan	Unit	Baik	2
37	1.3.2.05.002.006.044	Lambang Instansi	Unit	Baik	5
38	1.3.2.02.001.002.002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	Baik	4
39	1.3.2.02.001.001.001	Sedan	Unit	Baik	6
40	1.3.2.05.001.002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Unit	Baik	12
41	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	Unit	Baik	84
42	1.3.2.05.001.005.023	Overhead Projector	Unit	Baik	15
43	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	Buah	Baik	1
44	1.3.2.08.003.012.002	Bendera Merah Putih	Buah	Baik	4
45	1.3.2.02.001.003.007	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya (Dst)	Unit	Baik	1
46	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	Stel	Baik	3
47	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	Buah	Baik	17
48	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Buah	Baik	38



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
49	1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	Buah	Baik	8
50	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	Buah	Baik	37
51	1.3.2.05.001.002.001	Mesin Hitung Manual	Unit	Baik	2
52	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	Buah	Baik	87
53	1.3.2.05.001.005.024	Hand Metal Detector	Buah	Baik	3
54	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Buah	Baik	106
55	1.3.2.06.002.001.001	Telephone (PABX)	Buah	Baik	14
56	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	Buah	Baik	3
57	1.3.2.06.002.001.022	Alat Komunikasi Telephone Lainnya (Dst)	Buah	Baik	3
58	1.3.2.08.002.005.001	Generator Set (Lab Scale)	Buah	Baik	1
59	1.3.2.10.002.003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	Baik	12
60	1.3.2.05.001.003.011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	Baik	3
61	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	Buah	Baik	5
62	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	Buah	Baik	5
63	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	Baik	4
64	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	Stel	Baik	4
65	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	Stel	Baik	13
66	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	Baik	214



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
67	1.3.2.03.001.006.001	Mesin Gergaji	Unit	Baik	2
68	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	Buah	Baik	6
69	1.3.2.05.002.002.003	Jam Elektronik	Buah	Baik	24
70	1.3.2.05.002.005.002	Kompore Gas (Alat Dapur)	Buah	Baik	1
71	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	Buah	Baik	12
72	1.3.2.05.003.003.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Buah	Baik	24
73	1.3.2.08.003.004.066	Alat Peraga Praktek Sekolah	Unit	Baik	5
74	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal	Buah	Baik	214
75	1.3.2.03.001.003.001	Battery Charge	Buah	Baik	1
76	1.3.2.05.001.005.005	White Board	Buah	Baik	7
77	1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	Unit	Baik	2
78	1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	Unit	Baik	7
79	1.3.2.05.003.001.002	Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	Unit	Baik	5
80	1.3.2.06.002.001.022	Alat Komunikasi Telephone	Unit	Baik	3
81	1.3.2.06.002.006.007	Alat Komunikasi Sosial Lainnya (Dst)	Unit	Baik	1
82	1.3.2.05.003.004.004	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Unit	Baik	17
83	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply	Unit	Baik	17
84	1.3.2.06.002.002.004	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya (Dst)	Unit	Baik	5



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
85	1.3.2.05.002.006.017	Mic Conference	Unit	Baik	5
86	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	Baik	11
87	1.3.2.06.002.006.007	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Unit	Baik	1
88	1.3.2.01.003.004.005	electric generating set lainnya (dst	Unit	Baik	1
89	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	Buah	Baik	8
90	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	Stel	Baik	6
91	1.3.2.05.002.002.003	Jam Elektronik	Buah	Baik	24
92	1.3.2.05.002.004.007	Exhause Fan	Buah	Baik	2
93	1.3.2.05.002.005.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	Baik	2
94	1.3.2.05.003.003.001	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/ Bupati/Wa likota	Stel	Baik	24
95	1.3.2.07.001.012.019	Exercise Treadmil	Unit	Baik	1
96	1.3.2.07.002.004.001	Sepeda Statis	Buah	Baik	1
97	1.3.2.18.001.002.001	Rambu Jalan	Unit	Baik	1
98	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	Unit	Baik	4
99	1.3.2.05.001.005.003	Papan Visual/Papan Nama	Buah	Baik	2
100	1.3.2.05.002.001.024	Meja 1/2 Biro	Stel	Baik	65
101	1.3.2.05.002.001.026	Sketsel	Stel	Baik	1
102	1.3.2.05.002.001.027	Meja Makan Besi	Stel	Baik	3



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
103	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	Unit	Baik	3
104	1.3.2.05.002.006.069	Lampu	Buah	Baik	4
105	1.3.2.05.002.007.017	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	Buah	Baik	1
106	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Stel	Baik	50
107	1.3.2.05.003.004.007	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	Stel	Baik	5
108	1.3.2.05.003.004.008	Kursi Rapat Pejabat lainnya	Stel	Baik	2
109	1.3.2.05.003.005.008	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	Unit	Baik	1
110	1.3.2.08.007.002.046	Air Purlier	Unit	Baik	1
111	1.3.2.17.001.019.004	Jet Pump	Unit	Baik	3
112	1.3.2.05.002.001.011	Meja Ketik	Unit	Baik	1
113	1.3.2.06.001.001.059	Power Amplifier	Unit	Baik	1
114	1.3.2.05.002.006.015	Microphone Floor Stand	Stel	Baik	1
115	1.3.2.01.003.005.013	pompa lainnya (dst)	Stel	Baik	12
116	1.3.2.05.002.001.045	Nakas	Buah	Baik	1
117	1.3.2.05.002.006.029	Gambar Presiden/ Wakil Presiden	Unit	Baik	1
118	1.3.2.10.01.02.02	Laptop	Unit	Baik	18
119	1.3.2.05.02.01.30	Kursi Rapat	Unit	Baik	121
120	1.3.2.10.02.01.06	CPU	Unit	Baik	2



NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	SATUAN	KONDISI	JUMLAH
121	1.3.2.10.02.03.02	Monitor	Unit	Baik	10
122	1.3.2.05.01.04.11	Rotary Filing	Unit	Baik	1
123	1.3.2.05.02.01.03	Kursi Besi/Metal	Unit	Baik	71
124	1.3.2.05.03.03.04	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	Baik	2
125	1.3.2.05.03.03.06	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	Baik	26
126	1.3.2.05.03.03.08	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	Baik	129
127	1.3.2.05.03.06.04	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat Eselon II	Unit	Baik	2
128	1.3.2.05.03.07.07	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	Unit	Baik	8
129	1.3.2.09.02.01.11	Target Drone	Unit	Baik	3
130	1.3.5.01.01.04.05	Buku Umum/Hukum	Unit	Baik	117
131	1.3.5.01.01.05.01	Software	Unit	Baik	2
132	02.05.01.05.77	Papan Pengumuman	Unit	Baik	3
133	02.05.01.05.88	Alat Kantor Lainnya/Perkakas Kantor	Unit	Baik	8
134	02.05.02.01.04	Kursi Kayu	Unit	Baik	5
135	02.05.02.06.23	Tustel	Unit	Baik	6

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali periode jangka menengah RENSTRA Tahun 2024-2026 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target RENSTRA tahun 2018-2023 menurut Indikator Kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.7



Tabel 2.7
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026									
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-	Rasio Capaian pada Tahun ke-
					2024	2025	2026	(2021)	(2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 11 : Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sekala Dan Niskala Berdasarkan Nilai-Nilai									
1	Persentase Kajian strategis Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	-	20%	-	10%	15%	20%	N/A	N/A
2	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 22 : mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah									
1	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	-	-	-	56%	58%	60%	51%	100%
2	Nilai Evaluasi Kearsipan	-	-	-	63	64	65	61	100%
3	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	-	-	-	100%	100%	100%	50%	100%
4	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang diselesaikan dalam rangka Kepastian Hukum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	-	-	-	80,5	81	81,5	88	100%
6	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	-	87%	89%	91%	81%	100%



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

7	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	-	-	-	2,7	2,8	2,9	2,2	100%
8	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik	-	-	-	90%	95%	95%	85%	85%
9	Persentase Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE)	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	5.5%	6%	6%	5%	5%



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Capaian Kinerja Jangka Menengah Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, ditemukan tantangan dalam pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan secara proposional dalam perumusan kebijakan umum meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan serta administrasi;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perumusan dan penyelenggaraan kebijakan strategis program, kegiatan atau pekerjaan unggulan Daerah Provinsi;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/ prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan;
4. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kerjasama daerah dan luar negeri;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian capaian kinerja kegiatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mumpuni untuk menopang pertumbuhan perekonomian, serta kebijakan pembiayaan pembangunan strategis;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan akuntabel dan berkeadilan;
7. Mengembangkan ekonomi kreatif dan membina BUMD;
8. Mewujudkan kehidupan harmonis intern dan antar umat beragama;
9. Menata Produk hukum daerah;
10. Meningkatkan budaya taat hukum;
11. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baik kebutuhan masyarakat maupun Pemerintah Daerah.



Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-	Rata–Rata Pertumbuhan	
	2024	2025	2026	2021	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Biro Pemerintahan dan Kesra	8.160.640.000	8.964.450.000	10.320.600.000	26.698.831.489	93.19%	28.651.028.565	26.698.831.489
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	4.086.974.360	4.495.671.796	4.945.23975	16.504.401.214	87.97%	11.757.626.801	10.343.499.429
Biro Hukum	5.932.037.699	5.991.358.076	6.051.271.649	5.195.726.240	91.99%	5.647.862.144	5.195.726.240
Biro Organisasi	2.897.548.700	3.187.303.570	3.506.033.927	5.936.287.034	83,85%	7.079.136.135	5.936.287.034
Biro Umum dan Protokol	93.318.670.606	97.984.624.135	102.883.834.342	83.482.129.916	87,99%	83.482.129.916	73.462.912.062



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Bali bertugas membantu Gubernur Bali dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Sekretariat Daerah untuk Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan atas usulan Gubernur. Sekratariat Daerah Provinsi Daerah Bali dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang masing-masing Asisten terdiri dari 3 Biro sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Permasalahan pembangunan Provinsi Bali.
2. Dinamika Internasional, Nasional dan Regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Bali.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Bali.
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Provinsi Bali yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RPJMD Provinsi Bali.
5. Pemulihan Ekonomi Provinsi Bali.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Setda :					
1. Kebijakan	Belum ada ukuran kualitas kebijakan yang dikeluarkan	Belum ada	SDM	Sumber permasalahan kebijakan	Belum dapat mengukur keberhasilan dari dampak kebijakan yang ditetapkan
2. Produk Hukum yang mencakup kuantitas, kualitas, kejelasan objek hukum	Belum dapat terpenuhinya produk hukum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas dan dapat tersusun tepat waktu	Pedoman pembentukan peraturan, Peraturan di tingkat pusat dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM	Koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul Raperda dan DPRD	Keterbatasan SDM dalam melayani kebutuhan pendampingan penyusunan peraturan
3.Kelembagaan	- Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan ukuran - Kematangan Lembaga UKPBJ Level 3 (Proaktif	- Permendagri 99/2018 Permenpan RB 20/2018 -Perlem LKPP No 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggaran Peralatan SDM Sistem pengolahan data dukung belum terintegrasi secara menyeluruh	Perundang-Undangan Kebijakan Surat Edaran Koordinasi dengan para stakeholder belum maksimal	Data dari Perangkat Daerah yang tidak lengkap Kurang respon dari Perangkat Daerah Kompetensi SDM masih belum memadai
4. Penyusunan Penawaran Kerjasama Daerah	Belum mencapai target yang ditetapkan	Belum ada	Kurangnya SDM yang Kompeten dalam penyusunan proposal penawaran	Perangkat Daerah Teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukkan dalam penawaran kerjasama	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi dan dokumentasi
5. Kualitas Layanan Keprotokolan	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan	Pelayanan kedinasan dan keprotokolan yang diberikan	Adanya personil baru, intensitas kerja yang sangat tinggi	Belum adanya peraturan turunan/teknis tentang keprotokolan, belum	Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta



	adminstrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolan	selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan		pahamnya audiens mengenai aturan keprotokolan	bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan
6. Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan - sudah disusun Risk Register, Dokumen Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa dan Laporan SPPIP	- Realisasi kegiatan Provinsi - SOP Pengelolaan Risiko	Kuantitas SDM - Kompetensi SDM kurang memadai	- PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan - Pendidikan dan pelatihan belum memadai	- Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan - Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kurang maksimal dalam mengelola risiko
7. Kewajiban Penyusunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Laporan tersusun tepat waktu Sudah tersusun dengan baik	- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dokumen kinerja	- Ketersediaan SDM yang memahami penyusunan laporan Kompetensi SDM kurang memadai	Komitmen dari Perangkat Daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan Pendidikan dan pelatihan belum memadai	- Validasi dan Kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah Pelaksanaan pelaporan kurang maksimal dalam mengelola laporan
8. Kewajiban Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	Sudah disusun dengan baik	Hasil Evaluasi SAKIP		SDM kurang	Adanya mutasi ASN
9. Batas Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali	Patok dan Papan Batas masih kurang terpelihara dengan baik	Peremendagri No. 4 Tahun 2012	Kegiatan Sosialisasi Pathok dan papan batas wilayah	Pathok batas wilayah dipasang oleh Pemerintah Provinsi Bali	Koordinasi yang belum optimal
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali	Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat belum optimal	Komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan UU No. 23 Tahun 2014	Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait dengan petunjuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah



	perundangan				Daerah dan belum adanya kesamaan persepsi terkait pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014
Regulasi tentang kehidupan beragama	Fasilitasi kehidupan bergama	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006	Ketidakjelasan tugas dan fungsi	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Tindak Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan

3.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, beberapa permasalahan/isu-isu/kendala yang harus mendapat penanganan, sebagai berikut :

- I. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan, meliputi sebagai berikut:
 - 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali, meliputi:
 - a. Belum optimalnya perolehan nilai/skor penyusunan LPPD;
 - b. Masih adanya potensi sengketa batas wilayah;
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah dalam mengembangkan potensi daerah.
 - 2. Belum optimalnya pelaksanaan Srada dan Bhakti di kalangan Krama Bali.
- II. Biro Umum dan Protokol, meliputi sebagai berikut:
 - 1. Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat;
 - 2. Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan pengelola sistem e-office, keuangan dan BMD/Aset;
 - 3. Belum memadai tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing;
 - 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip, dan
 - 5. Masih kurangnya sarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang kearsipan.
- III. Biro Hukum, meliputi sebagai berikut:
 - 1. Kualitas perancangan dan pelayanan produk hukum daerah belum optimal;
 - 2. Pelayanan aksesibilitas informasi hukum dan produk hukum daerah belum optimal;
 - 3. Pelayanan dan penanganan kasus-kasus hukum dan pelaporan Ham belum optimal; dan
 - 4. Perda dan perkara yang berdampak undang-undang cipta kerja.



- IV. Biro Organisasi, meliputi sebagai berikut:
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal;
 7. Tata kelola pemerintahan belum optimal;
 8. Pelayanan publik belum optimal; dan
 9. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan serta rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.
- V. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Ekonomi, meliputi sebagai berikut:
1. Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya dan layanan);
 2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan;
 3. Pengadaan barang/jasa pemerintahan berpotensi menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%-40% dari total APBD);
 4. Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah;
 5. Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah; dan
 6. Belum optimalnya pelaksanaan administrasi pelaporan pembangunan daerah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program biro-biro.



Tabel. 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2021	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali	Meningkatnya penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	Persentase Kajian strategis Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	%	N/A	10%	15%	20%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sektor Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	%	81%	87%	89%	91%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kearsipan	Indeks/ Nilai	61	63	64	65
		Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	%	50%	100%	100%	100%



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2021	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja di Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	Nilai	81	80,5	81	81,5
		Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Diselesaikan Dalam Rangka Kepastian Hukum	%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	%	51%	56%	58%	60%
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	Nilai/Skor	2.2	2,7	2,8	2,9



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target		
				2021	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Membantu Kepala Daerah Melalui Sekretaris Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan, Pembinaan dan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Serta Perekonomian, Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Terwujudnya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Menghasilkan Value For Money	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik	Indeks	85	90	95	95
	Terwujudnya Perekonomian Bali yang Beradaya Saing dan Berkelanjutan Serta Meningkatkan Tertib Administrasi Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	100%	100	100	100
		Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	76%	87	100	100



4.1.2 Cascading

Cascading merupakan suatu gambaran yang merepresentasikan sesuatu yang disusun dan dialirkan secara menurun. Didalam kaitannya dengan kinerja, cascading diaplikasikan sebagai proses penurunan dan penyelarasan target-target organisasi kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarki. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan strategis Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai core business Perangkat Daerah terkait. Tujuan strategis ini yang juga dijabarkan kedalam Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Cascading disusun setelah memetakan pohon kinerja sesuai dengan struktur organisasi. Cascading merupakan proses penjabaran Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Berikut bentuk cascading biro-biro pada Sekretariat Daerah, antara lain (terlampir).



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut:



Tabel 5.1.
Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Stategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	1. Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	Optimalisasi peran Lembaga Keagamaan dan Penerapan Nilai-nilai Falsafah Sad Kerthi	1. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Nilai-nilai Falsafah Sad Kerthi
		Fasilitasi dan pemberian bantuan (subsidi) untuk pelaksanaan upacara Pitra Yadnya bagi seluruh Krama Bali dan bantuan sarana peribadatan Pura (Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Jagat, Kahyangan Desa	1. Evaluasi capaian kebijakan Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Penataan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang terintegrasi	1. Pemantauan dan Evaluasi efektifitas penyusunan LPPD Provinsi Bali Terintegrasi
3. Meningkatkan kebijakan penyelenggara pemerintah yang berkualitas	3. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	1. Meningkatkan kualitas penyusunan Peraturan Perundang-undangan
			2. Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan DPRD
			3. Meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum
			4. Meningkatkan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
			5. Meningkatkan pembinaan masyarakat sadar hukum



			6. Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah
4. Membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan, pembinaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa serta perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan administrasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	4.Terwujudnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang menghasilkan value for money	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1.Meningkatkan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa yang tepat waktu, kualitas, harga dan penyedia serta pengembangan katalog lokal dalam mendukung peningkatan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas.
			2.Meningkatkan fungsi pembinaan dan advokasi untuk mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penguatan kelembagaan dan pemenuhan serta peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM pengadaan.
			3.Meningkatan fungsi pengelolaan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui pemenuhan standar LPSE, dan pengembangan manajemen informasi untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kepuasan pelanggan internal dan eksternal.
	Terwujudnya perekonomian Bali yang beradaya saing dan berkelanjutan serta meningkatkan tertib administrasi pembangunan	Terselenggaranya fasilitasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan daerah sesuai ketentuan	1.Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok, percepatan akses keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam 2.Pengendalian tata kelola dan pelayanan BUMD dan BLUD
			3.Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sektor Publik	Membangun Sarana Prasarana Pelayanan Publik yang Terintegrasi anatar Instansi Lembaga Pemerintahan Daerah.	1. Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya
6. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Membangun Sistem Tata Kelola yang Terintegrasi	1. Pelayanan Publik terselenggara dengan cara – cara yang efisien,efektif dan transparan.
		Terwujudnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT dan keuangan / Aset
			2. Meningkatnya tenaga keprotokolan
		Terwujudnya arsip lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat yang dikelola sesuai NSPK	1. Optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, berdasarkan Permendagri tersebut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di susun oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.



Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan sebagaimana dituangkan pada Tabel T-C.27 sebagai berikut :



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	2,2	2,7	1.760.420.000	2,8	1.820.460.000	2,9	1.960.456.000	2,9	2.854.600.000	Biro Pem.Kesra	Bali
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali	Nilai Manajemen Evaluasi Kinerja	80	81	2.325.840.000	82	2.468.540.000	83	2.516.648.000	83	3.430.620.000		
Meningkatnya Pengembangan Budaya Spriritual di Kalangan Masyarakat Bali	Meningkatnya penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kajian strategis Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	N/A	10%	4.074.380.000	15%	4.675.450.000	20%	5.843.496.000	20%	6.650.850.456		



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Umum dan Protokol
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas Tata Kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Program Pengelolaan Arsip	- Nilai Evaluasi Kearsipan - Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	61 50%	63 100%	598.708.774	64 100%	628.644.212	65 100%	660.076.423	65 100%	1.887.429.409	Biro Umum dan Protokol	Denpasar
		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100%	100%	275.482.192	100%	289.256.301	100%	303.719.116	100%	868.457.609		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	250 Box	1.000 Berkas	275.482.192	100%	289.256.301	100%	303.719.116	100%	868.457.609		
		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	21%	21%	323.226.582	100%	339.387.911	100%	356.357.307	100%	1.018.971.800		
		Sub Bagian Penyediaan Informasi, Akses Dan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan	4 Kali Layanan Arsip 400	400 Pengguna	42.796.110	100%	44.935.916	100%	47.182.711	100%	134.914.737		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna Arsip										
		Sub Bagian Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	30 Pengelola Arsip 35 Dokumen	45 Laporan	280.430.473	100%	194.451.996	100%	309.174.595	100%	884.057.063		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	82	82	92.719.961.832	83	97.355.959.924	83	102.223.757.920	83	292.299.679.675		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	727.390.921	12 Bulan	763.760.467	12 Bulan	801.948.490	12 Bulan	2.293.099.878		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	727.390.921	6 Dokumen	763.760.467	6 Dokumen	801.948.490	6 Dokumen	2.293.099.878		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat	12 Bulan	12 Bulan	772.562.923	12 Bulan	811.191.069	12 Bulan	851.750.622	6 Dokumen	2.293.099.878		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Daerah	Daerah											
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	12 Dokumen	772.562.923	12 Dokumen	811.191.069	12 Dokume n	851.750.622	12 Dokume n	2.435.504.613		
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	529.887.670	12 Bulan	560.382.054	12 Bulan	584.201.156	12 Bulan	1.670.470.880		
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	21 Laporan	529.887.670	21 Laporan	560.382.054	21 Laporan	584.201.156	21 Laporan	1.670.470.880		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	19.145.280.473	12 Bulan	20.102.544.496	12 Bulan	21.107.671.721	12 Bulan	30.355.496.690		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	702.381.645	2 Paket	737.500.727	2 Paket	774.375.764	2 Paket	2.214.258.136		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 Paket	4 Paket	2.672.674.219	4 Paket	2.806.307.930	4 Paket	2.946.623.326	4 Paket	8.425.605.475		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan											
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	7.278.210.429	12 Laporan	7.642.120.950	12 Laporan	8.024.226.998	12 Laporan	22.944.558.377		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	7.846.872.894	12 Laporan	8.239.216.539	12 Laporan	8.651.177.366	12 Laporan	24.737.266.798		
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Sistem	2 Dokumen	645.141.286	2 Dokumen	677.398.350	2 Dokumen	711.268.267	2 Dokumen	2.033.807.903		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	22.991.367.028	12 Bulan	24.140.935.380	12 Bulan	25.347.982.149	12 Bulan	72.480.284.557		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.111.922.749	12 Laporan	2.217.518.886	12 Laporan	2.328.394.831	12 Laporan	6.657.836.466		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	12 Laporan	15.709.916.895	12 Laporan	16.495.412.740	12 Laporan	17.320.183.377	12 Laporan	49.525.513.011		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Orang	108 Orang	5.169.527.384	108 Orang	5.428.003.754	108 Orang	5.699.403.941	108 Orang	16.296.935.079		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	12 Bulan	12.985.746.052	12 Bulan	13.635.033.355	12 Bulan	14.316.785.023	12 Bulan	40.937.564.430		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	141 Unit	141 Unit	7.582.347.014	141 Unit	7.961.464.364	141 Unit	8.359.537.582	141 Unit	23.903.348.960		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Paket	24 Unit	5.403.399.039	24 Unit	5.673.568.991	24 Unit	5.957.247.440	24 Unit	17.034.215.470		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	12 Bulan	12 Bulan	6.971.723.256	12 Bulan	7.320.309.418	12 Bulan	7.686.324.889	12 Bulan	21.987.357.563		
		Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	2 Orang/ Bulan	6.971.723.256	2 Orang/ Bulan	7.320.309.418	2 Orang/ Bulan	7.686.324.889	2 Orang/ Bulan	21.987.357.563		
		Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	25.290.158.282	12 Bulan	26.554.666.196	12 Bulan	27.882.399.505	12 Bulan	79.727.223.983		
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Laporan	47 Paket	18.250.039.699	47 Paket	19.162.541.684	47 Paket	20.120.668.769	47 Paket	57.533.250.152		
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Laporan	40 Paket	6.716.394.755	40 Paket	7.052.214.493	40 Paket	7.404.825.218	40 Paket	21.173.434.466		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Daerah												
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Laporan	1 Paket	3223.723.827	1 Paket	339.910.018	1 Paket	356.905.519	1 Paket	1.020.539.365		
		Kegiatan Fasilitasi Materi Dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	758.010.330	12 Bulan	795.910.847	12 Bulan	835.706.389	12 Bulan	2.389.627.565		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	758.010.330	12 Laporan	795.910.847	12 Laporan	835.706.389	12 Laporan	2.389.627.565		
		Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	12 Bulan	12 Bulan	2.547.734.898	12 Bulan	2.675.226.643	12 Bulan	2.808.987.975	12 Bulan	8.032.049.516		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	2.547.734.898	12 Laporan	2.675.226.643	12 Laporan	2.808.987.975	12 Laporan	8.032.049.516		



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Hukum
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Layanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Hukum dan HAM	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Dihasilkan dalam rangka Kepastian Hukum	4.423.058.674	100%	4.757.221.740	100%	5.232.943.914	100%	5.756.238.305	300%	15.746.403.958	Biro Hukum	Denpasar
		Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	1.965.140.398	100%	2.350.024.547	100%	2.585.027.002	100%	2.843.529.702	300%	7.778.581.251		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	1.359.154.688	45 Dokumen	1.404.479.331	45 Dokume n	1.544.927.264	45 Dokume n	1.699.419.991	135 Dokume n	4.648.826.586		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	167.905.792	1000 Dokumen	218.929.964	1000 Dokume n	240.822.960	1000 Dokume n	264.905.256	3000 Dokume n	724.658.181		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	119.628.784	50 Dokumen	262.359.227	50 Dokumen	288.595.149	50 Dokumen	317.454.664	150 Dokumen	868.409.041		
		Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	318.451.134	300 Dokumen	464.256.025	350 Dokumen	510.681.628	400 Dokumen	561.749.790	1050 Dokumen	1.536.687.443		
		Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase fasilitasi bantuan hukum yang dilaksanakan	2.457.918.276	100%	2.407.197.192	100%	2.647.916.912	100%	2.912.708.603	100%	7.967.822.707		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	2.107.472.492	39 Kasus	2.159.196.371	42 Kasus	2.375.116.008	46 Kasus	2.612.627.609	127 Kasus	7.146.939.989		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	350.445.784	27 Kasus	248.000.821	29 Kasus	272.800.903	31 Kasus	300.080.994	87 Kasus	820.882.718		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	1.224.803.470	80,5	1.384.247.352	81	1.522.672.088	81,5	1.674.939.296	81,5	4.581.858.736		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Diselesaikan	115.677.950	100%	82.521.252	100%	90.773.377	100%	99.850.715	300%	273.145.344		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9.999.550	1 Paket	16.498.680	1 Paket	18.148.548	1 Paket	19.963.403	3 Paket	54.610.631		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53.504.700	1 Paket	11.431.310	1 Paket	12.574.441	1 Paket	13.831.885	3 Paket	37.837.636		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29.999.700	2 Paket	16.499.450	2 Paket	18.149.395	2 Paket	19.964.335	6 Paket	54.613.180		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.174.000	1 Tahun	38.091.812	1 Tahun	41.900.993	1 Tahun	46.091.093	3 Tahun	126.083.898		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	1.109.125.520	100%	1.301.726.100	100%	1.431.898.710	100%	1.575.088.581	300%	4.308.713.392		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Daerah												
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	474.030.144	8 Unit	537.453.616	8 Unit	591.198.977	8 Unit	650.318.875	24 Unit	1.778.971.468		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	547.565.376	9 Unit	703.805.485	9 Unit	774.186.033	9 Unit	851.604.637	27 Unit	2.329.596.155		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5.000.000	10 Unit	5.500.000	10 Unit	6.050.000	10 Unit	6.655.000	30 Unit	18.205.000		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82.530.000	69 Unit	54.967.000	69 Unit	60.463.700	69 Unit	66.510.070	207 Unit	181.940.770		



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan
Perekonomian
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai/Skor LPPD Provinsi Bali	2,2	2,7	1.760.420.000	2,8	1.820.460.000	2,9	1.960.456.000	2,9	2.854.600.000	Biro Pengadaan Barang/Jas a dan Perekonom ian	Bali
Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	Terkendalnya Stabilitas Harga Pangan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase kebijakan perekomian yang ditinjaklanjuti	100%	100%	119.750.400	100%	131.725.440	100%	144.897.984	100%	396.373.824		
			Persentase Deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah	5	5.5	78.927.200	6	86.819.920	6	95.501.912	6	261.249.031		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa minimal Baik	85%	90%	617.810.600	95%	679.591.660	95%	747.550.826	100%	2.044.953.086		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang	76%	87%	74.309.400	100%	81.740.340	100%	89.914.374	100%	245.964.114		



Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Biro Organisasi
Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sektor Publik	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	51%	56%	785,000,000	58%	863,500,000	60%	949,850,000	60%	9,498,500,000	Biro Organisasi	Denpasar
		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan	51%	56%	635,000,000	58%	698,500,000	60%	768,350,000	60%	768,350,000		
		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kegemaran Membaca Masyarakat	51%	56%	150,000,000	58%	165,000,000	60%	181,500,000	60%	181,500,000		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	84%	85%	1.378.500.000	86%	1.516.350.000	87%	1.667.985.000	87%	1.667.985.000		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	13 Dokumen	13 Dokume n	8.500.000	13 Dokume n	9.350.000	13 Dokume n	10.285.000	13 Dokume n	10.285.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti	100%	100%	570.000.000	100%	627.000.000	100%	689.700.000	100%	689.700.000		



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			tepat waktu											
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang terinventaris dengan baik	1 Laporan	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	880.000.000	1 Laporan	960.000.000	1 Laporan	960.000.000		
		Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya baik	81%	87%	1.138.450.000	89%	1.252.295.000	91%	1.377.524.500	91%	1.377.524.500		
		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	81%	87%	445.000.000	89%	489.500.000	91%	726.000.000	91%	726.000.000		
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya baik	81%	87%	600.000.000	89%	660.000.000	91%	726.000.000	91%	726.000.000		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka tiga tahun yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tujuan penetapan IKU adalah sebagai berikut;

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukandalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasar strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama, antara lain:

1. Klarifikasi apa apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai;
2. Menyusun draf awal indikator kinerja utama yang mungkin dapat digunakan;
3. Melakukan penilaian setiap indikator kinerja utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja;
4. Memilih indikator kinerja utama

Berikut Kinerja Indikator Utama pada Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut (terlampir):



Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Sekretariat Daerah
			2024	2025	2026	
I	Urusan Perpustakaan					
1	Persentase Perpustakaan yang tertangani dengan baik	51%	48%	49%	51%	53%
2	Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	20%	10%	18,85%	20%	22%
II	Urusan Kearsipan					
1	Nilai Evaluasi Kearsipan	61	63	64	65	63
2	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib arsip	50%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Arsip yang Terlindungi dan Terselamatkan	N/A	N/A	N/A	N/A	40%
4	Persentase Capaian Standar Penggunaan Arsip	N/A	N/A	N/A	N/A	50%



7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan dan pengukuran indikator kinerja kunci/utama (IKK/IKU). Perumusan indikator kinerja adalah yang menggambarkan keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah yang diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator kinerja lainnya yang digunakan yang diintegrasikan dalam rumusan yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada public. Rumusan indikator kinerja disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis daerah sebagai factor penentu keberhasilan kinerja.

Tujuan IKK adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut Indikator Kunci Sekretariat Daerah :



Biro Umum dan Protokol

FORM PENGISIAN DATA IKK DALAM LPPD

No	Ikk Outcome	Ikk Output	Jenis Data	Inputan	Capaian Sesuai Hasil Perhitungan Aplikasi	Bukti Dukung
I	URUSAN KEARSIPAN					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	235,285	100%	
			Jumlah seluruh arsip aktif	235,285		
2		Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	3,545	47%	
			Jumlah seluruh arsip inaktif	7,507		
3		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	7,738	100%	
			Jumlah seluruh arsip statis	7,739		
4		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	119	1%	
			Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi bali	15,245		
5	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	Pergub No. 100/03-K/HK/2021	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
6		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	Pergub Tata Cara Penyelenggaraan Kearsipan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	



Renstra Setda Provinsi Bali Tahun 2024-2026

7		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	Pergub Tata Cara Penyelenggaraan Kearsipan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
8		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	Perka ANRI No. 20 Tahun 2011	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
9		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Pergub Penyelenggaraan Kearsipan (Bagian Kesatu)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
10		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Pergub Penyelenggaraan Kearsipan (Bagian Kelima)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	
11	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Tingkat ketersediaan arsip = 62	
12			Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	47%		
13			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%		
14			Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	1%		



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2024-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Bali. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Bali. Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu memahami kemana arah kebijakan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.



PEMERINTAH PROVINSI BALI

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

SEKRETARIAT DAERAH



**Jl. Basuki Rahmat-Niti Mandala
Renon Denpasar**



www.baliprov.go.id





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai landasan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Dokumen ini merupakan upaya untuk mengarahkan langkah-langkah strategis dalam memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan kegiatan atau sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Rencana Strategis (Renstra) tidak terlepas dari kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam adanya perencanaan ini. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan pagu indikatif, indikator dan target kinerja.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak, khususnya para pejabat dan staf biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Bali, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029.

Bali, 22 September 2025
Sekretaris Daerah Provinsi Bali

Dewa Made Indra
NIP. 19670203 198602 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 KEDUDUKAN DAN PERANAN RENSTRA DALAM PERENCANAAN DAERAH	4
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI.....	7
2.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI.....	7
2.1.1 Kedudukan dan Struktur Organisasi	7
2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH	13
2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH.....	14
2.3.1 Penerapan dan Pencapaian SPM.....	14
2.3.2 Dukungan Layanan	18
2.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	26
2.4.1 Permasalahan Pelayanan pada Sekretariat Daerah	26
2.4.2 Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah	27
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	35
3.1 TUJUAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029	35
3.2 SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029.....	36
3.3 STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029	40
3.4 ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN	44
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN	44
4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	51
4.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK).....	53
BAB V PENUTUP.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 7 Februari 2025 masa jabatan 2025-2030 merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab untuk Bali yang sejahtera, aman dan damai, melalui Visi dan Misi ***“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU”***, yang diselenggarakan secara terencana menyeluruh serta terintegrasi antara alam, manusia, dan kebudayaan guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia dengan memperhatikan tradisi, adat istiadat, seni dan budaya dan kearifan lokal.

Dalam Surat Edaran Nomor 1635 tahun 2025 tentang “Penyampaian Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 Sebagai Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Semesta Berencana Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029” yang merupakan ketentuan dalam penyusunan RENSTRA dimana seluruh Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Renstra tersebut yang bertujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 89 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantiknya sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, dimana memuat visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029 telah memperhatikan Tujuan, Sasaran dan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Program Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2045 serta arah kebijakan RPJMD Provinsi Bali sampai dengan tahun 2045. Dalam penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029



didasarkan pada Visi Misi RPJMD Provinsi Bali. Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2025-2029 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka menengah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informatika Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Emas Baru 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan rencana program, kegiatan dan anggaran serta Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan/atau Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan Penganggaran Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.



4. Menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan menjadi arah penyusunan perencanaan Sekretariat Daerah.

1.4 Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024, yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk Menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 serta meminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029.

RENSTRA Sekretariat Daerah bersama Renstra Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh mengandung Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan, sehingga RENSTRA ini berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Sekretariat Daerah, fungsi Renstra dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Perangkat Daerah, serta Pedoman dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Kedudukan dan Peranan RENSTRA dalam Perencanaan Daerah

Mengemukakan secara ringkas keterkaitan peranan Renstra Sekretariat Daerah dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian Program Prioritas Sekretariat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah ini.

2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Perangkat Daerah. Uraian tentang Struktur Organisasi, jumlah personil dan Tata Laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur dan mekanisme).

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan Sasaran/Target Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator pelayanan Sekretariat Daerah dan/atau indikator lainnya SDG atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.



2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah

Memuat hal-hal berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2025-2029.
- b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kinerja (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV menguraikan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan serta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu (Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 dan memuat penentuan target pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja utama (IKU) dan memuat target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI

2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali

Sekretariat Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bali merupakan perangkat daerah yang menjadi penunjang tugas-tugas pemerintahan di tingkat provinsi, dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Fungsi utama Setda adalah mendukung Gubernur Bali dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Setda juga bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan pelayanan publik di lingkungan Provinsi Bali. Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretariat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, Lembaga Lain, dan Staf Ahli Lingkungan Pemerintah Daerah.

Prioritas Pembangunan Sekretaris Daerah yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Adapun Visi Misi yang diampu oleh Sekretariat Daerah adalah Misi 1 dan Misi 22, yaitu Misi 1 : Memantapkan penyelenggaraan tata kehidupan Krama Bali secara Niskala-Sekala berdasarkan nilai-nilai kearifan loka Sad Kerthi, yaitu Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi, dan Misi 22 : Memantapkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, dan Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Cepat, Pasti, dan Murah.

2.1.1 Kedudukan dan Struktur Organisasi

Adapun Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Bali langsung berada di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Bali. Sedangkan untuk Struktur Organisasi Sekretariat Daerah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur



Bali Nomor 9 Tahun 2025. Adapun ruang lingkup kerja Kinerja Sekretariat Daerah menangani urusan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Urusan Renstra Sekretariat Daerah

Urusan Perpustakaan

TUJUAN	Meningkatnya Literasi Masyarakat		
INDIKATOR	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KETERANGAN
Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	
Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	
Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	Meningkatnya Kualitas Perpustakaan dan Pustakawan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di Bidang Perpustakaan	

Urusan Kearsipan

TUJUAN	Meningkatnya Tata Kelola Arsip		
INDIKATOR	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KETERANGAN
Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
Perizinan Penggunaan Arsip	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup	
Akreditasi dan Sertifikasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan Kompetensinya	

**Urusan Sekretariat Daerah**

TUJUAN	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien		
INDIKATOR	Indeks Reformasi Birokrasi		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KETERANGAN
Penataan Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	
Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Efektifitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	
Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
Fasilitasi Koordinasi Hukum	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	
Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	
Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	
Kebijakan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas:

Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

SEKRETARIS DAERAH;**A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:**

1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan; dan
 - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Kerjasama, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kerjasama; dan
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual dan Kelembagaan Bina Spiritual;
 - 2) Sub Bagian Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar;



2. Biro Hukum, terdiri dari:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - 2) Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum.
- c. Bagian Bantuan Hukum dan HAM, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Litigasi;
 - 2) Sub Bagian Non Litigasi; dan
 - 3) Sub Bagian HAM dan Penyuluhan Hukum.

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

1. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian, terdiri dari:
 - a. Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Strategi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 3) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 2) Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian.
 - c. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bagian BUMD dan BLUD; dan
 - 3) Sub Bagian Administrasi Pembangunan.

C. Asisten Administrasi Umum, membawahi:

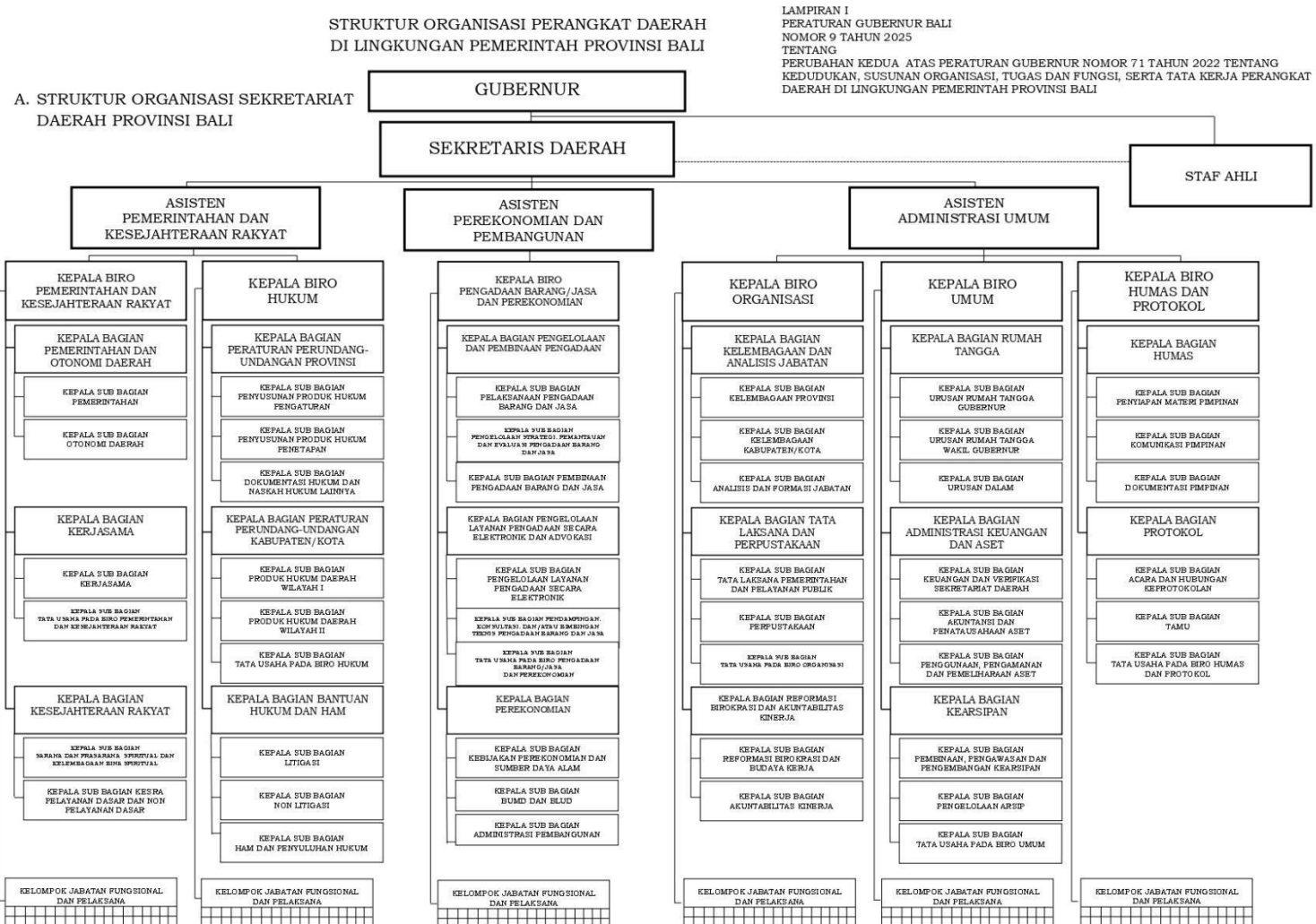
1. Biro Organisasi, terdiri dari:
 - a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
 - 2) Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/ Kota; dan
 - 3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.



- b. Bagian Tata Laksana dan Perpustakaan;
 - 1) Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - 2) Sub Bagian Perpustakaan; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi.
 - c. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja; dan
 - 2) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
2. Biro Umum, terdiri dari:
- a. Bagian Rumah Tangga, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
 - 2) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
 - 3) Sub Bagian Urusan Dalam.
 - b. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
 - 2) Sub Bagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
 - 3) Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Aset.
 - c. Bagian Kearsipan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kearsipan;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Arsip; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Umum.
3. Biro Humas dan Protokol, terdiri dari:
- a. Bagian Humas, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan;
 - 2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - b. Bagian Protokol, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Acara dan Hubungan Keprotokolan;
 - 2) Sub Bagian Tamu; dan
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Humas dan Protokol.



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali





2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Sumber daya Sekretariat Daerah (Setda) mencakupi berbagai elemen penting yang mendukung fungsi dan operasionalnya, termasuk sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya teknologi.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset terpenting Setda, yang terdiri dari Sekretaris Daerah, (Sekda), para Pejabat Eselon II, II dan IV, serta pegawai lainya yang bekerja di berbagai unit kerja Setda. SDM ini memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan administrasi, dan memberikan pelayanan administrasi kepada perangkat daerah yang berfungsi bertanggung jawab atas perencanaan, dan pengawasan tugas-tugas pemerintahan daerah, serta memberikan pelayanan administratif. Sumber Daya Keuangan setda memerlukan SDM yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Sumber daya keuangan ini berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), serta dapat juga berasal dari sumber-sumber lainya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berfungsi memastikan tersedianya anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan setda dan perangkat daerah. Sumber Daya Fisik Setda mencakupi kantor, peralatan kerja, sarana dan prasarana pendukung lainya. Sumber Daya Teknologi dalam era digital, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sangat penting, Setda perlu memiliki sumber daya TIK yang memadai untuk mendukung pengelolaan data, komunikasi dan pelayanan publik yang efisien.

Untuk Menunjang pelaksanaan tugas. Sekretariat Daerah Provinsi Bali memiliki pegawai sebanyak 768 orang. Disamping potensi-potensi positif yang dimiliki SDM, juga didapatkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu ; a) SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b) pola pembinaan pegawai sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi; c) penerapan sistem manajemen sumber daya manusia masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi dan pegawai. Adapun SDM/ Pegawai tersebut antara lain:



Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Provinsi Bali

NO	URAIAN	JABATAN	ESELON	PANGKAT/GOL	JUMLAH
1.	PNS	SEKRETARIS DAERAH	I	IV/e	1
		ASISTEN	II	IV/d	3
		STAF AHLI	II	IV/c	3
		KEPALA BIRO	II	IV/a-IV/d	5
		KEPALA BAGIAN	III	III/d-IV/b	17
		KEPALA SUB BAGIAN	IV	III/c-IV/a	47
		FUNGSIONAL	-	III/c-IV/a	73
		PELAKSANA	-	II/c - III/d	73
2.	PPPK	FUNGSIONAL	-	X-VII	35
		PELAKSANA	-	X-VII	276
3.	NON ASN	STAF	-	-	224

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Dalam konteks Sekretariat Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merujuk pada ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. SPM mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerja umum, perumahan rakyat, dan perlindungan masyarakat. Pada biro-biro yang berada dalam lingkungan.

Peran Sekretariat Daerah dalam SPM:

1. Sekretariat Daerah berperan sebagai koordinator dan fasilitator;
2. Sekretariat Daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan SPM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. Sekretariat Daerah juga berperan dalam menyusun laporan kinerja SPM secara berkala dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.

2.3.1 Penerapan dan Pencapaian SPM

1. Bidang Urusan Pendidikan

1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada



bagian kedua SPM Pendidikan Pasal 5 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Pelayanan pendidikan menengah;
2. Pelayanan pendidikan khusus.

1.2. Target Pencapaian SPM

Tabel 2.2
Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	100 %	2024
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	100 %	2024

2. Bidang Urusan Kesehatan

2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada bagian ketiga SPM Kesehatan Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar untuk Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

2.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada pasal 4 yaitu capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100%.



Tabel 2.3
Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Layanan	Target	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 %	2024
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100 %	2024

3. Bidang Urusan Pekerja Umum

3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Bab II Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Bagian Kesatu SPM Bidang Pekerjaan Umum menyebutkan Pasal 5 ayat (1) Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota; dan
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota.

3.2 Target Pencapaian SPM

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 adalah seperti tabel berikut:



Tabel 2.4
Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Capaian	
					2022	2023
1	Pekerjaan Umum	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	100%	2024		
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	100%	2024		

Sumber: Dinas PUPR PERKIM Provinsi Bali (2024)

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

4.2 Target Pencapaian SPM

Penerapan SPM Perumahan Rakyat sesuai dengan kondisi pada tahun 2024 tidak ada Bencana tingkat Provinsi dan tidak ada relokasi program pemerintah sehingga untuk kegiatan ini tidak ada realisasi pelaksanaan. Akan tetapi sesuai dengan tahapan pelaksanaan penerapan SPM ini dilakukan kegiatan pendataan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan dalam



perencanaan penerapan SPM. Kegiatan pendataan yang dilakukan tahun 2024 merupakan langkah awal penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat. Hingga tahun 2024 data yang diperoleh adalah data jumlah rumah dan lokasi lahan potensial yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Perumahan Rakyat. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Tabel Lokasi Rumah di Kawasan Rawan Bencana

No.	Kabupaten	Luas Perumahan (Ha)	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Klungkung	476,97	31.606	7.909	39.545
2	Karangasem	915,50	25.885	5.723	26.842
3	Buleleng	71.678,60	27.703	6.945	27.780
Total		73.071,07	85.194	20.577	94.167

Sumber : Dinas PUPR PERKIM Provinsi Bali, 2024

2.3.2 Dukungan Layanan

1. Dukungan Layanan Bidang Urusan Pendidikan

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali tahun 2024 total sebanyak 10.150 orang terdiri dari 8.488 orang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1.662 orang dengan status tenaga kontrak (Non ASN). Untuk tenaga ASN terdiri dari 4.824 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3.664 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). Tenaga ASN terkonsentrasi di lingkungan Kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 191 orang dan tenaga kontrak sebanyak 237 orang. ASN yang terdistribusikan pada Satuan Pendidikan sebanyak 7.808 orang terdiri dari 4.144 orang PNS dan 4.072 orang PPPK dengan tugas sebagai Kepala Sekolah sebanyak 140 orang.

Secara administrasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali memiliki tanggung jawab pengelolaan dan urusan pelayanan terhadap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan total layanan sebanyak 365 sekolah, yang terdiri atas 90 SMA Negeri, 71 SMA Swasta, 58 SMK Negeri dan 112 SMK Swasta, 12 SLB Negeri dan 3 SLB Swasta. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dibantu 2 Unit



Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yakni UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPTD BPTEKDIK) dan UPTD. Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (UPTD BPTKK).

2. Dukungan Layanan Bidang Urusan Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Pada tahun 2024 fasilitas kesehatan yang dimiliki di Provinsi Bali meliputi 82 Rumah Sakit, 120 puskesmas, 252 klinik, 9 public safety center di 9 kabupaten/kota dan Provinsi. Tetapi data ini belum cukup untuk mengetahui kapasitas kesehatan terutama dalam masa tanggap darurat bencana. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan mengamanatkan penanggulangan krisis kesehatan dilakukan berdasarkan sistem klaster yang melaksanakan fungsi koordinasi, kolaborasi dan integrasi penanggulangan krisis di tingkat daerah yang merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan bencana. Klaster kesehatan terdiri dari sub klaster (pelayanan kesehatan, kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, jiwa, gizi, dan DVI) dan tim pendukung (tim logistik, tim data dan informasi dan tim promosi kesehatan) yang kegiatannya dikoordinir Dinas Kesehatan Provinsi.

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Sasaran Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang di gunakan adalah penduduk yang masuk dalam kelompok risiko rawan terkena KLB PD3I yaitu kelompok umur 0-2 thn yang merupakan sasaran imunisasi dasar dan lanjutan. Pelayanan kesehatan pada kelompok ini bertujuan untuk mencegah terjadinya KLB kasus PD3I di Prov Bali. Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah memberikan imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, dibentuk Tim Gerak Cepat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam Tim tersebut dinyatakan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan KLB di Provinsi Bali diantaranya adalah Balai Besar Veteriner Denpasar, Fakultas Kedokteran UNUD, Dinas Peternakan Provinsi Bali, RSUP Sanglah Denpasar, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar, KKP Kelas I Denpasar, serta seluruh Seksi/Subbag di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali.



Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Bali

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			79	80.50	81.00	81.50	79.20	78.99	79.40	79.80	
2	Indeks Reformasi Birokrasi			71	74	75	76	91.41	93.46	92.80	93.40	
3	Persentase Capaian Realisasi SPM Provinsi Bali			N/A	70	75	80	94,44	93,97			



Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Bali
Tahun 2020-2024

Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

NO	PROGRAM	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.747.921.668	1.739.721.312	6.590.374.953	6.242.620.069	7.635.001.546	7.514.146.579	1.935.221.838	1.738.749.004	2.168.646.130	1.903.460.886
2.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	508.638.500	335.175.900	1.148.963.485	1.041.933.806	2.184.010.227	1.651.142.870	1.747.510.156	1.359.361.418	1.684.516.980	1.518.334.473
3.	Program Kesejahteraan Rakyat	12.055.257.805	9.822.460.177	20.911.690.163	18.868.670.978	34.066.894.896	33.483.836.757	75.811.614.672	72.169.418.447	47.968.779.030	45.636.230.777

**Biro Hukum**

NO	PROGRAM	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)
1	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	4.423.058.674	4.132.736.415	4.353.769.888	4.255.452.256	4.642.753.476	4.427.903.056	5.232.126.870	4.619.705.752
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	7.809.060.91	6.039.448.859	1.519.534.764	1.437.508.703	1.228.154.276	1.121.658.165	2.374.918.240	1.864.692.342
3	Program Pengembangan Produk Hukum	1.716.268.698	1.711.767.630	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Pengembangan Produk Hukum	378.654.548	377.978.747	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Bantuan Hukum dan HAM	2.221.630.531	1.962.613.592	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	648.310.614	640.394.476	-	-	-	-	-	-	-	-

**Biro Pengadaan Barang Jasa dan Perekonomian**

NO	PROGRAM	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	-	3.328.928.054	2.953.794.604	2.972.755.364	2.507.259.554	3.307.678.560	2.683.576.348
2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	-	-	-	-	6.232.816.710	485.147.794	627.688.000	481.981.642	1.212.485.000	905.635.080
3	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	-	-	-	-	2.714.843.950	2.291.896.510	3.725.179.000	2.713.552.974	7.575.257.000	7.338.956.640
4	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	58.375.030	45.431.403	73.660.000	15.695.350	82.125.000	67.025.724

**Biro Organisasi**

NO	PROGRAM	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)
1	Program Pembinaan Perpustakaan	-	-	-	-	444.857.938	419.865.580	587.451.764	448.397.304	525.774.880	486.215.430
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	-	-	-	-	-	-	-	-	101.698.480	99.978.980
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	6.826.510.784	5.707.108.732	657.515.344	536.168.186	1.313.220.988	819.570.873	2.048.907.450	1.543.502.036
4	Program Penataan Organisasi	-	-	252.625.351	229.178.302	326.865.406	303.912.237	892.836.892	608.963.417	962.815.700	810.539.019

**Biro Umum dan Protokol**

NO	PROGRAM	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)	ANGGARAN	REALISASI (RP)
1	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	50.219.074.830	43.759.954.780	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	2.144.247.652	2.024.652.845	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.317.159.086	1.307.270.124	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	83.482.129.916	73.462.912.062	116.168.334.356	99.864.602.620	523.603.864	435.430.514	661.907.040	610.378.540
5	Program Pengelolaan Arsip	-	-	-	-	164.453.346	134.700.526	98.528.923.086	83.115.508.761	88.108.216.382	76.016.161.054



2.4 Permasalahan dan Isu Strategis

2.4.1 Permasalahan Pelayanan pada Sekretariat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) meliputi ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan kebijakan, lemahnya koordinasi antara perangkat daerah, serta kurangnya kapasitas SDM untuk menjalankan tugas dan fungsi Setda secara optimal;

1. Ketidaksesuaian Rencana dan Pelaksanaan Kebijakan
 - a. Perencanaan yang kurang sesuai, Renstra Strategis yang belum selaras atau belum mampu mengidentifikasi isu-isu strategis,
 - b. Pelaksanaan yang kurang efektif: implementasi kebijakan terhadap perubahan lingkungan strategis yang menimbulkan tumpang tindih atau kurang efektif,
 - c. Adaptasi terhadap perubahan: kurangnya adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian target pembangunan daerah,
2. Koordinasi Antara Perangkat Daerah yang Lemah
 - a. Kurangnya sinkronisasi: koordinasi antara dinas dan lembaga teknis daerah yang belum optimal, sehingga menyebabkan tumpang tindih tugas atau kurangnya sinergisitas
 - b. Kurangnya komunikasi: komunikasi yang kurang lancar antara SETDA dengan perangkat daerah dapat menyebabkan miskomunikasi atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas,
 - c. Kurangnya data dan informasi: kurangnya pertukaran data dan informasi antara perangkat daerah dapat menghambat pengambilan keputusan dan perencanaan yang efektif
3. Kapasitas SDM yang Belum Memadai
 - a. Kurangnya keterampilan: SDM yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas SETDA khususnya dalam bidang perencanaan, pengawasan, dan pelayanan publik
 - b. Kurang sarana dan prasarana: kurangnya dukungan sarana dan prasarana seperti teknologi informasi dan komunikasi, dapat menghambat kinerja SDM
 - c. Kurangnya motivasi dan inovasi: kurangnya motivasi dan inovasi dari SDM dapat menurunkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah.



4. Permasalahan Lainnya
 - a. Tantangan Eksternal: Perubahan kebijakan yang sering terjadi dan tumpang tindih dapat menghambat pelaksanaan tugas SETDA
 - b. Lingkungan yang tidak kondusif: kondisi keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum yang tidak terjamin dapat menghambat pelaksanaan pembangunan daerah

Langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan
2. Meningkatkan Koordinasi
3. Meningkatkan Kapasitas SDM
4. Meningkatkan Inovasi dan Adaptasi

2.4.2 Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah

Pada tahun 2025 program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Bali memasuki awal baru dari RPJMD 2025-2029 dan merupakan kebijakan baru dari periode terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2030. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas, fungsi dan tataran kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, beberapa permasalahan/isu-isu/kendala yang harus mendapat penanganan, sebagai berikut:

- I. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan, meliputi sebagai berikut:
 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bali, meliputi:
 - a. Belum optimalnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali;
 - b. Masih adanya potensi sengketa batas wilayah;
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah dalam mengembangkan potensi daerah.
 2. Belum optimalnya pelaksanaan Sradha dan Bhakti di kalangan Krama Bali
- II. Biro Hukum, meliputi sebagai berikut:
 1. Kualitas perancangan dan pelayanan produk hukum daerah belum optimal;
 2. Pelayanan aksesibilitas informasi hukum dan produk hukum daerah belum optimal;
 3. Pelayanan dan penanganan kasus-kasus hukum dan pelaporan Ham belum optimal; dan



4. Perda dan perkara yang terdampak undang-undang cipta kerja.
- III. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Ekonomi, meliputi sebagai berikut:
1. Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya dan layanan);
 2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan;
 3. Pengadaan barang/jasa pemerintahan berpotensi menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%-40% dari total APBD);
 4. Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah;
 5. Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah; dan
 6. Belum optimalnya pelaksanaan administrasi pelaporan pembangunan daerah.
- IV. Biro Organisasi, meliputi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum optimal;
 2. Tata kelola pemerintahan belum optimal;
 3. Pelayanan publik belum optimal; dan
 4. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan serta rendahnya minat dan budaya baca masyarakat.
- V. Biro Umum, meliputi sebagai berikut;
1. Belum Optimalnya Pelayanan Terhadap Atensi Pimpinan;
 2. Belum Optimalnya Kualitas SDM di Bidang Teknologi Informasi; dan
 3. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemahaman Terhadap Arsip.
- VI. Biro Humas dan Protokol, meliputi sebagai berikut;
1. Tingginya Dinamika Kegiatan Pimpinan yang butuh Atensi Cepat dan Tepat;
 2. Kurang Maksimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 3. Belum Memadainya Tenaga Keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan Asing.



Tabel 2.8
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

NO	ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
				INTERNAL	EKSTERNAL	
Gambaran Pelayanan Setda						
1	Kebijakan	Belum ada ukuran kualitas kebijakan yang dikeluarkan	Belum ada	SDM	Sumber permasalahan kebijakan	Belum dapat mengukur keberhasilan dari dampak kebijakan yang ditetapkan
2	Produk Hukum yang mencakup kuantitas, kualitas, kejelasan objek hukum	Belum dapat terpenuhinya produk hukum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas dan dapat tersusun tepat waktu	Pedoman pembentukan peraturan, Peraturan di tingkat pusat dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM	Koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul Raperda dan DPRD	Keterbatasan SDM dalam melayani kebutuhan pendampingan penyusunan peraturan
3	Kelembagaan	- Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan ukuran - Kematangan Lembaga UKPBJ Level 3 (Proaktif	- Permendagri 99/2018 - Permenpan RB 20/2018 - Perlem LKPP No 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Anggaran Peralatan SDM Sistem pengolahan data dukung belum terintegrasi secara menyeluruh	Perundang-Undangan Kebijakan Surat Edaran Koordinasi dengan para stakeholder belum maksimal	- Data dari Perangkat Daerah yang tidak lengkap - Kurang respon dari Perangkat Daerah - Kompensasi SDM masih belum memadai



NO	ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
				INTERNAL	EKSTERNAL	
4	Penyusunan Penawaran Kerjasama Daerah	Belum mencapai target yang ditetapkan	Belum ada	Kurangnya SDM yang Kompeten dalam penyusunan proposal penawaran	Perangkat Daerah Teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukan dalam penawaran kerjasama	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi dan dokumentasi
5	Kualitas Layanan Keprotokolan	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolan	Pelayanan kedinasan dan keprotokolan yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan	Adanya personil baru, intensitas kerja yang sangat tinggi	Belum adanya peraturan turunan/teknis tentang keprotokolan, belum pahamnya audiens mengenai aturan keprotokolan	Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan
6	Pengendalian kegiatan	- Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan - Sudah disusun Risk Register, Dokumen Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa dan Laporan SPPIP	- Realisasi kegiatan Provinsi - SOP Pengelolaan Risiko	- Kuantitas SDM - Kompetensi SDM kurang memadai	- PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan - Pendidikan dan pelatihan belum memadai	- Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan - Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kurang maksimal dalam mengelola risiko



NO	ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
				INTERNAL	EKSTERNAL	
7	Kewajiban Penyusunan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	- Laporan tersusun tepat waktu - Sudah tersusun dengan baik	- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Dokumen kinerja	- Ketersediaan SDM yang memahami penyusunan laporan - Kompetensi SDM kurang memadai	- Komitmen dari Perangkat Daerah terkait untuk menyuplai data yang diperlukan dalam penyusunan laporan - Pendidikan dan pelatihan belum memadai	- Validasi dan Kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah - Pelaksanaan pelaporan kurang maksimal dalam mengelola laporan
8	Kewajiban Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali	Sudah disusun dengan baik	Hasil Evaluasi SAKIP	-	SDM kurang	Adanya mutasi ASN
9	Batas Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali	Patok dan Papan Batas masih kurang terpelihara dengan baik	Permendagri No. 4 Tahun 2012	Kegiatan Sosialisasi Patok dan papan batas wilayah	Patok batas wilayah dipasang oleh Pemerintah Provinsi Bali	Koordinasi yang belum optimal
10	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan	Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali belum dapat	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat belum optimal	Komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan UU No. 23 Tahun 2014	Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait dengan petunjuk pelaksanaan urusan



NO	ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
				INTERNAL	EKSTERNAL	
	Pemerintah Provinsi Bali	dilaksanakan sesuai peraturan perundangan				yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum adanya kesamaan persepsi terkait pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014
11	Regulasi tentang kehidupan beragama	Fasilitasi kehidupan beragama	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006	Ketidakjelasan tugas dan fungsi	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Tindak Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan



Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Bali dapat disimpulkan bahwa Reformasi Birokrasi (RB) di Indonesia dijalankan melalui dua pendekatan utama yang saling melengkapi: RB General dan RB Tematik. RB General, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, merupakan upaya untuk menata ulang sistem penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Fokusnya adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi secara holistik. RB General mencakup delapan area perubahan utama: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen. SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas Pelayanan publik.

Tabel 2.9
Hasil Evaluasi RB/ Indeks RB

RB General Awal	80.31
Koefisien	0.8
RB General	81.11
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	81.11
RB Tematik	12.35
Indeks RB	93.46

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Indeks RB Provinsi Bali pada tahun 2024 mencapai 93,46. Pencapaian ini merupakan hasil dari penilaian RB General dan RB Tematik. Nilai RB General Provinsi Bali adalah 81,11, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 75,94. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, meliputi area-area seperti manajemen perubahan, penataan regulasi, penguatan organisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, RB Tematik Provinsi Bali memperoleh nilai 12,35. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, RB Tematik tetap berperan penting dalam mencapai target Indeks RB yang telah ditetapkan. RB Tematik berfokus pada isu-isu prioritas yang membutuhkan penanganan khusus dan terukur, seperti reformasi



birokrasi di bidang pengadaan barang dan jasa, perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Evaluasi RB ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.



BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan Renstra juga untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra juga sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, serta memastikan keselarasan antara tujuan Sekretaris Daerah dengan tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Secara garis besar Tujuan Renstra Sekretariat Daerah, meliputi antara lain:

1. Meningkatkan Akuntabilitas:

Renstra membantu dalam mengukur kinerja Sekretariat Daerah dan memastikan bahwa kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana.

2. Pedoman Bagi Seluruh Bagian Sekretariat Daerah:

Renstra menjadi acuan bagi setiap unit kerja dalam menyusun rencana kerja, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan renstra.

3. Mendukung Tata Pemerintahan Yang Baik:

Renstra berkontribusi pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah dan efisien.

4. Sebagai Acuan Dalam Penyusunan Renja:

Renstra memastikan bahwa Renja yang disusun selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis Sekretariat Daerah.



5. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya:

Renstra membantu dalam mengalokasikan sumber daya, termasuk anggaran daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

6. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah:

Renstra dapat menjadi alat untuk meningkatkan kinerja berbagai perangkat daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah adalah meliputi tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Setda. Renstra Sekretariat Daerah digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Pembangunan.

Adapun sasaran renstra sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan:

Renstra Setda memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD

2. Tugas pokok dan Fungsi:

Renstra Setda mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setda.

3. Pedoman Perencanaan:

Renstra Setda menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta sebagai acuan dalam pengelolaan anggaran.

4. Evaluasi Kinerja:

Renstra Setda juga berfungsi sebagai alat evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat daerah Tahun 2025-2029

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rayat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	83	84	85	86	87	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	75%	90%	91%	92%	93%	94%	
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Sad Kerthi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yang Difasilitasi	N/A	80%	83%	85%	87%	90%	

Biro Hukum

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas dan Koordinasi Hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Indeks Reformasi Hukum	98,31	98,32	98,33	98,34	98,35	98,36	



Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Persentase Rata-Rata Pemanfaatan Sistem PBJ	95%	95%	95%	97%	97%	97%	
		Persentase Keterisian Jabatan Fungsional PBJ terhadap Formasi yang sudah Mendapatkan Rekomendasi	75%	80%	80%	85%	85%	90%	
		Tingkat Kematangan Lembaga UKPBJ	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	95%	95%	95%	97%	97%	97%	
		Persentase Komitmen Belanja Produk Dalam Negeri	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Perekonomian Bali yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta Meningkatkan Tertib Administrasi Pembangunan	Persentase Terkendalinya Inflasi Provinsi Bali	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kinerja BUMD Kategori Sehat	70%	70%	75%	80%	80%	85%	
		Persentase Capaian Program Kerja TPKAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**Biro Organisasi**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (RPD)	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien, mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta pelayanan perpustakaan dalam menumbuhkan minat dan budaya baca masyarakat	87%	91%	93%	95%	97%	99%	
			60%	70%	72%	74%	76%	78%	

Biro Umum

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Publik	83	83	83	83	83	83	

Biro Humas dan Protokol

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	82	83	84	84	84	
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Informasi Publik dan Layanan Keprotokolan	Persentase Informasi Publik yang tersampaikan dengan baik ke Masyarakat	93	94	95	96	97	98	
		Persentase Kepuasan Pimpinan Terhadap Pelayanan Keprotokolan	90	91	92	93	94	95	



3.3 Strategis Sekretariat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah meliputi menyusun kebijakan daerah, koordinasi tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan, serta pelayanan administrasi dan pembinaan ASN.

Sekretariat Daerah menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra, di antaranya:

1. Menyusun kebijakan Daerah:
Setda membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan daerah yang sesuai dengan RPJMD
2. Koordinasi Tugas Perangkat Daerah:
Setda memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah untuk mengidentifikasi kendala dan mengambil langkah korektif.
3. Pelayanan Administrasi dan Pembinaan ASN:
Setda memberikan pelayanan administrasi yang baik dan melakukan pembinaan ASN agar profesional dan kompeten.
4. Pengembangan SDM ASN:
Setda melakukan berbagai upaya pengembangan SDM ASN, seperti pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir.
5. Inovasi dan peningkatan Kualitas Pelayanan:
Setda mendorong inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien.

3.4 Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan dalam Renstra juga merupakan pedoman yang mengarahkan rumusan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berperan sebagai panduan dalam menentukan strategis-strategis dalam program kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra.



Adapun Arah Kebijakan tersebut, meliputi;

1. Mencerminkan Visi, Misi, dan Tujuan Jangka Panjang;
2. Menentukan Prioritas Pembangunan;
3. Menentukan Kebijakan Umum;
4. Menghubungkan dengan Rencana Keuangan dan Sumber Daya;
5. Memperjelas Rumusan Strategis
6. Memandu Pemilihan Program dan Kegiatan



Tabel 3.2
Pentahapan Pelaksanaan per tahun sebagai implementasi langkah-langkah
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan

BIDANG PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN				
					TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Serta Kearifan Lokal (Prioritas 1)	Terwujudnya kemandirian masyarakat Bali dan pelestarian kebudayaan Bali	Meningkatnya kualitas Kehidupan Krama Bali Berdasarkan Nilai-Nilai <i>Sad Kerthi</i>	Memperkuat Pemahaman Krama Bali Terhadap Nilai-Nilai <i>Sad Kerthi</i>	Meningkatkan sosialisasi <i>Sad Kerthi</i> pada kehidupan Krama Bali melalui Desa Adat	Pembinaan mental spiritual generasi muda dan tokoh agama	Pembinaan mental spiritual bagi ASN dan tokoh adat	Pembinaan mental spiritual bagi masyarakat dan ormas	Pembinaan mental spiritual generasi muda dan tokoh agama	Pembinaan mental spiritual bagi ASN dan tokoh adat
			Meningkatkan keharmonisan umat beragama berdasarkan pemahaman Krama Bali terhadap Nilai-Nilai <i>Sad Kerthi</i>	Mengembangkan tata kehidupan yang harmonis bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal <i>Sad Kerthi</i> .	Pemberian bhakti penganyar, pelaksanaan yasa kerthi, pemberian hibah masyarakat dan kelembagaan	Pemberian bhakti penganyar, pelaksanaan yasa kerthi, pemberian hibah masyarakat dan kelembagaan	Pemberian bhakti penganyar, pelaksanaan yasa kerthi, pemberian hibah masyarakat dan kelembagaan	Pemberian bhakti penganyar, pelaksanaan yasa kerthi, pemberian hibah masyarakat dan kelembagaan	Pemberian bhakti penganyar, pelaksanaan yasa kerthi, pemberian hibah masyarakat dan kelembagaan



BIDANG PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN				
					TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
		Terwujudnya Kasukertan Desa Adat	Meningkatkan peran Desa Adat dalam pengelolaan sosial, budaya, dan ekonomi berbasis nilai-nilai <i>Sad Kerthi</i> .	Memperkuat Kelembagaan dan Tata Kelola Desa Adat					
Bali Pulau Digital dan keamanan Digital (Prioritas 6)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pengumpulan dan Pengolahan Data yang Akurat	Fokus pada Hasil Kinerja (berorientasi hasil)	Reviu dan Evaluasi	Transparansi dan Akuntabilitas	Transparansi dan Akuntabilitas



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, berdasarkan Permendagri tersebut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan sebagaimana dituangkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:



Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					37.664.577.105		42.453.095.849		44.599.457.002		49.593.383.267		51.930.373.195	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2.865.770.839		3.965.770.839		4.115.070.839		6.965.770.839		7.115.770.839	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	82	82	83	2.865.770.839	84	3.965.770.839	85	4.115.070.839	86	6.965.770.839	87	7.115.770.839	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					1.959.614.502		2.282.115.090		2.498.915.747		2.742.868.491		2.935.621.222	
Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	70	75	77	1.959.614.502	79	2.282.115.090	81	2.498.915.747	83	2.742.868.491	85	2.935.621.222	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					32.839.191.764		36.205.209.920		37.985.470.416		39.884.743.937		41.878.981.134	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yang Ditindaklanjuti (%)	73	-	80	32.839.191.764	83	36.205.209.920	85	37.985.470.416	87	39.884.743.937	90	41.878.981.134	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					37.664.577.105		42.453.095.849		44.599.457.002		49.593.383.267		51.930.373.195	



Biro Hukum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					6.544.055.989		8.235.367.232		8.753.382.613		12.050.674.819		12.554.090.785	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2.951.063.828		4.051.063.828		4.171.570.893		7.021.570.893		7.171.570.893	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	81	81	81,5	2.951.063.828	82	4.051.063.828	82,5	4.171.570.893	82,5	7.021.570.893	83	7.171.570.893	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					3.592.992.161		4.184.303.404		4.581.811.720		5.029.103.926		5.382.519.892	
Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum (%)	100	100	100	3.592.992.161	100	4.184.303.404	100	4.581.811.720	100	5.029.103.926	100	5.382.519.892	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					6.544.055.989		8.235.367.232		8.753.382.613		12.050.674.819		12.554.090.785	



Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian

BIDANG URUSAN / PROGRAM OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					4.396.920.980		5.803.161.528		6.159.031.390		8.959.443.886		9.292.478.297	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2.536.107.573		3.636.107.573		3.786.107.573		6.354.867.100		6.504.867.100	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	82	83	83	2.536.107.573	84	3.636.107.573	84	3.786.107.573	84	6.354.867.100	84	6.504.867.100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					892.420.001		1.039.288.671		1.138.020.968		1.249.118.486		1.336.899.217	
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	892.420.001	100	1.039.288.671	100	1.138.020.968	100	1.249.118.486	100	1.336.899.217	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					853.541.591		994.011.906		1.088.442.916		1.194.700.445		1.278.657.005	
Meningkatnya Kualitas Pengadaaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (%)	85	85	85	853.541.591	85	994.011.906	90	1.088.442.916	90	1.194.700.445	90	1.278.657.005	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					114.851.815		133.753.378		146.459.933		160.757.855		172.054.975	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)	87	87	87	114.851.815	87	133.753.378	90	146.459.933	90	160.757.855	90	172.054.975	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					4.396.920.980		5.803.161.528		6.159.031.390		8.959.443.886		9.292.478.297	



Biro Organisasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.255.000.000		1.380.500.000		1.518.550.000		1.670.405.000		1.837.445.500	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.030.000.000		1.133.000.000		1.246.300.000		1.370.930.000		1.508.023.000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Provinsi Bali	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik (%)	60	70	70	1.030.000.000	72	1.133.000.000	74	1.246.300.000	76	1.370.930.000	78	1.508.023.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					225.000.000		247.500.000		272.250.000		299.475.000		329.422.500	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno di Provinsi Bali	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun (%)	5	5	5	225.000.000	7	247.500.000	9	272.250.000	11	299.475.000	13	329.422.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					3.371.079.315		4.597.872.414		4.833.108.930		7.779.020.456		8.004.802.382	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2.600.644.785		3.700.644.785		3.850.644.785		6.700.644.785		6.850.644.785	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	85	86	87	2.600.644.785	88	3.700.644.785	88	3.850.644.785	88	6.700.644.785	88	6.850.644.785	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					770.434.530		897.227.629		982.464.145		1.078.375.671		1.154.157.597	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik (%)	87	89	91	770.434.530	93	897.227.629	95	982.464.145	97	1.078.375.671	99	1.154.157.597	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
TOTAL KESELURUHAN					4.626.079.315		5.978.372.414		6.351.658.930		9.449.425.456		9.842.247.882	



Biro Umum

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					449.040.991		489.663.489		502.060.379		500.975.672		487.437.552	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					449.040.991		489.663.489		502.060.379		500.975.672		487.437.552	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Kearsipan (Nilai)	63	64	65	449.040.991	65	489.663.489	65,5	502.060.379	66	500.975.672	66,5	487.437.552	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip (%)	100	100	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					69.800.564.515		71.560.135.789		71.710.135.789		74.710.135.789		74.312.690.615	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					69.800.564.515		71.560.135.789		71.710.135.789		74.710.135.789		74.312.690.615	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	83	83	83	69.800.564.515	83	71.560.135.789	83	71.710.135.789	83	74.710.135.789	83	74.312.690.615	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
TOTAL KESELURUHAN					70.249.605.506		72.049.799.278		72.212.196.168		75.211.111.461		74.800.128.167	



Biro Humas dan Protokol

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					27.732.433.474		29.119.055.148		30.575.007.905		32.103.758.300		33.708.946.215	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					27.732.433.474		29.119.055.148		30.575.007.905		32.103.758.300		33.708.946.215	
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	0	0	82	6.808.574.510	83	7.149.003.236	84	7.506.453.397	85	7.881.776.067	86	8.275.864.870	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kepuasan layanan informasi publik dan layanan keprotokolan	Persentase Informasi Publik yang tersampaikan dengan baik ke Masyarakat (%)	0	0	94	20.923.858.964	95	21.970.051.912	96	23.068.554.508	97	24.221.982.233	98	25.433.081.345	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Kepuasan Pimpinan Terhadap Layanan Keprotokolan (%)	0	0	91		92		93		94		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					27.732.433.474		29119055148.00		30.575.007.905		32.103.758.300		33.708.946.215	



4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja Setda dalam mencapai tujuan strategisnya. Iku ini membantu Sekda dalam menyusun perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Iku juga berperan dalam pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tujuan penetapan IKU adalah sebagai berikut;

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama, antara lain:

1. Klarifikasi apa apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai;
2. Menyusun draf awal indikator kinerja utama yang mungkin dapat digunakan;
3. Melakukan penilaian setiap indikator kinerja utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja;
4. Memilih indikator kinerja utama.

Berikut Kinerja Indikator Utama pada Sekretariat Daerah, pada tabel 4.2 sebagai berikut:



Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4.01.2.23.2.24.01.0000 - Sekretariat Daerah										
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	-	73,00	73,73	74,43	75,15	75,88	76,60	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	92,80	93,40	93,80	94,40	94,80	95,40	
3	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali	Angka	0	18,96	24,25	28,30	33,13	37,23	43,11	
4	Nilai AKIP	Nilai	-	79,40	79,80	80,20	80,60	81,00	81,40	
5	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Nilai	-	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60	3,62	
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	-	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00	
7	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	98,31	98,32	98,33	98,34	98,35	98,36	



4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan dan pengukuran indikator kinerja kunci/utama (IKK/IKU). Perumusan indikator kinerja adalah yang menggambarkan keberhasilan kinerja suatu perangkat daerah yang diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator kinerja lainnya yang digunakan yang diintegrasikan dalam rumusan yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja.

Tujuan IKK adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut Indikator Kunci Sekretariat Daerah pada tabel 4.3 sebagai berikut:



Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										



Biro Hukum

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

**Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa		%	85	85	85	85	90	90	90	
3	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku		%	87	87	87	87	90	90	90	

**Biro Organisasi**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
1	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	positif	%	5	5	5	7	9	11	13	
2	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik	positif	%	60	70	70	72	74	76	78	
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	positif	%	87	89	91	93	95	97	99	



Biro Umum

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
1	Nilai Evaluasi Kearsipan	positif	Nilai	63	64	65	65	65,5	66	66,5	
2	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	positif	%	100	100	60	65	70	75	80	
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	positif	Nilai	83	83	83	83	83	83	83	



Biro Humas dan Protokol

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Provinsi Bali Tahun 2025- 2029 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2025-2029

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Bali. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja Sekretariat Daerah.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Bali. Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, sub kegiatan lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu memahami kemana arah kebijakan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.



LAMPIRAN

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.01.2.23.2.24.01.0001 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat							
- Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional, serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
					Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat		Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali (Angka)		
					Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yang Ditindaklanjuti (%)	4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase Pengembangan Mental Spiritual yang difasilitasi	4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	
					Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	4.01.04.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	
					Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang difasilitasi	4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	4.01.04.1.02.0003 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	
		Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai AKIP (Nilai)		
					Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
				Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Persentase Barang Milik Daerah yang tertata	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan otonomi daerah		Persentase Realisasi Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
					Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
						4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
						4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	
						4.01.03.1.01.0003 - Fasilitas Penataan Wilayah	
					Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
						4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah	
						4.01.03.1.02.0001 - Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	
						4.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	4.01.03.1.03.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	
					Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	4.01.03.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Hukum							
- Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional, serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
					Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai AKIP (Nilai)		
					Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Nilai)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM			Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum (%)	4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	
					Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	
					Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	4.01.05.1.01.0002 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	
					Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	4.01.05.1.01.0004 - Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	
				Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02 - Fasilitas Bantuan Hukum	
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02 - Fasilitas Bantuan Hukum	
					Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02.0001 - Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	4.01.05.1.02.0002 - Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.01.2.23.2.24.01.0007 - Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian							
- Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional, serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
					Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai AKIP (Nilai)		
					Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Nilai)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
		Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan		Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti (%)	4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	4.01.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	4.01.06.1.02.0001 - Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	4.01.06.1.03.0001 - Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	
					Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (%)	4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
				Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03.0002 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.07.1.03.0003 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)	4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	4.01.08.1.01.0001 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	4.01.08.1.02.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.01.2.23.2.24.01.0005 - Biro Organisasi							
- Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional, serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
					Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai AKIP (Nilai)		
					Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Nilai)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Provinsi Bali			Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik (%)	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
					Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.1.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
					Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2.23.02.1.01.0009 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	
					Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	2.23.02.1.01.0011 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	
					Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2.23.02.1.01.0016 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
				Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	2.23.02.1.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	2.23.02.1.02.0004 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
			Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno di Provinsi Bali	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun (%)	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
					Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	2.23.03.1.01 - Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	
					Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	2.23.03.1.01.0001 - Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	
				Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2.23.03.1.03 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	
					Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	2.23.03.1.03.0003 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4.01.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik (%)	4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
				Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01 - Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01.0001 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4.01.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan	
				Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	4.01.02.1.02 - Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4.01.02.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.01.2.23.2.24.01.0003 - Biro Umum dan Protokol							
- Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional, serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
					Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai AKIP (Nilai)		
					Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Nilai)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		Nilai Evaluasi Kearsipan (Nilai)	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip (%)	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		
				Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		
				Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		
				Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		
				Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah arsip dinamis yang telah disusun (Arsip)	2.24.02.1.01.0004 - Penyusunan Arsip Dinamis	
					Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	2.24.02.1.01.0006 - Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	
					Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	2.24.02.1.01.0008 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)	2.24.02.1.01.0011 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	
					Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	2.24.02.1.01.0012 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	
				Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	
					Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	2.24.02.1.02.0005 - Akuisisi Arsip Statis	
				Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
					Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	
					Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	2.24.02.1.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	2.24.02.1.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.01.2.23.2.24.01.0008 - Biro Humas dan Protokol							
- Meningkatnya Efektifitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terwujudnya Pelestarian Budaya Bali	Terwujudnya Kebudayaan Bali yang Kuat, Maju, dan Fungsional, serta Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien				Indeks Pembangunan Kebudayaan (Angka)		
					Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
		Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi, dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai AKIP (Nilai)		
					Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) (Nilai)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
		Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya kepuasan layanan informasi publik dan layanan keprotokolan		Persentase Informasi Publik yang tersampaikan dengan baik ke Masyarakat (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persentase Kepuasan Pimpinan Terhadap Layanan Keprotokolan (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	4.01.01.1.13.0001 - Penyiapan Materi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.1.13.0003 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	
				Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	4.01.01.1.14.0002 - Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4.01.0.00.0.00.01.0004 - Biro Hukum										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.01.2.23.2.24.01.0000 - Sekretariat Daerah										
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	---	73,00	73,73	74,43	75,15	75,88	76,60	
2	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali	Angka	0	18,96	24,25	28,30	33,13	37,23	43,11	
III	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Nilai AKIP	Nilai	-	79,40	79,80	80,20	80,60	81,00	81,40	
2	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Nilai	-	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60	3,62	
3	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	-	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00	
4	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	98,31	98,32	98,33	98,34	98,35	98,36	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH PROVINSI BALI

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4.01.2.23.2.24.01.0000 - Sekretariat Daerah										
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	---	73,00	73,73	74,43	75,15	75,88	76,60	
2	Indeks Pelestarian Warisan Budaya Bali	Angka	0	18,96	24,25	28,30	33,13	37,23	43,11	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Nilai AKIP	Nilai	-	79,40	79,80	80,20	80,60	81,00	81,40	
2	Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Nilai	-	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60	3,62	
3	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	-	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00	
4	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	98,31	98,32	98,33	98,34	98,35	98,36	
4.01.2.23.2.24.01.0003 - Biro Umum dan Protokol										
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	83	83	83	83	83	83	83	
2	Nilai Evaluasi Kearsipan	Nilai	63	64	65	65	65,5	66	66,5	
3	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip	%	100	100	60	65	70	75	80	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				37.664.577.105		42.453.095.849		44.599.457.002		49.593.383.267		51.930.373.195		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.865.770.839		3.965.770.839		4.115.070.839		6.965.770.839		7.115.770.839		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Keseekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	82	83	2.865.770.839	84	3.965.770.839	85	4.115.070.839	86	6.965.770.839	87	7.115.770.839	4.01.2.23.2.24.01.00 01 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				366.000.000		402.600.000		442.860.000		487.146.000		535.860.600		
Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	366.000.000	4	402.600.000	4	442.860.000	4	487.146.000	4	535.860.600		
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				366.000.000		402.600.000		442.860.000		487.146.000		535.860.600		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	366.000.000	4	402.600.000	4	442.860.000	4	487.146.000	4	535.860.600		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				893.770.839		1.746.570.839		1.883.950.839		4.580.059.388		4.638.679.817		
Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	893.770.839	2	1.746.570.839	2	1.883.950.839	2	4.580.059.388	2	4.638.679.817		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				25.000.000		26.700.000		28.570.000		30.627.000		32.889.700		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	26.700.000	1	28.570.000	1	30.627.000	1	32.889.700		
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				450.000.000		495.000.000		544.500.000		598.950.000		658.845.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	450.000.000	2	495.000.000	2	544.500.000	2	598.950.000	2	658.845.000		
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000	1	38.500.000	1	42.350.000	1	46.585.000	1	51.243.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				383.770.839		1.186.370.839		1.268.530.839		3.903.897.388		3.895.701.617		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	383.770.839	1	1.186.370.839	1	1.268.530.839	1	3.903.897.388	1	3.895.701.617		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.606.000.000		1.816.600.000		1.788.260.000		1.898.565.451		1.941.230.422		
Persentase Barang Milik Daerah yang tertata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	15	1.606.000.000	15	1.816.600.000	15	1.788.260.000	15	1.898.565.451	15	1.941.230.422		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	160		160		160		160					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	105	124		124		124		124					
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.481.000.000		1.680.600.000		1.640.160.000		1.737.155.451		1.765.179.422		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	15	1.481.000.000	15	1.680.600.000	15	1.640.160.000	15	1.737.155.451	15	1.765.179.422		
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				95.000.000		104.500.000		114.950.000		126.445.000		139.089.500		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	105	124	95.000.000	124	104.500.000	124	114.950.000	124	126.445.000	124	139.089.500		
4.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		31.500.000		33.150.000		34.965.000		36.961.500		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	160	30.000.000	160	31.500.000	160	33.150.000	160	34.965.000	160	36.961.500		
4.01.03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				1.959.614.502		2.282.115.090		2.498.915.747		2.742.868.491		2.935.621.222		
Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan otonomi daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	70	77	1.959.614.502	79	2.282.115.090	81	2.498.915.747	83	2.742.868.491	85	2.935.621.222	4.01.2.23.2.24.01.00 01 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.01.03.1.01 - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan				514.614.502		632.615.090		624.465.747		620.973.491		541.536.722		
Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah (Dokumen)	2	2	514.614.502	2	632.615.090	2	624.465.747	2	620.973.491	2	541.536.722		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	11	3		2		2		2					
4.01.03.1.01.0001 - Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				309.614.502		407.115.090		376.415.747		348.118.491		241.396.222		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan (Dokumen)	11	3	309.614.502	2	407.115.090	2	376.415.747	2	348.118.491	2	241.396.222		
4.01.03.1.01.0003 - Fasilitasi Penataan Wilayah				205.000.000		225.500.000		248.050.000		272.855.000		300.140.500		
Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (Dokumen)	2	2	205.000.000	2	225.500.000	2	248.050.000	2	272.855.000	2	300.140.500		
4.01.03.1.02 - Pelaksanaan Otonomi Daerah				505.000.000		565.500.000		632.050.000		705.255.000		785.780.500		
Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	2	2	505.000.000	2	565.500.000	2	632.050.000	2	705.255.000	2	785.780.500		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
4.01.03.1.02.0001 - Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				340.000.000		384.000.000		432.400.000		485.640.000		544.204.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD (Dokumen)	2	2	340.000.000	2	384.000.000	2	432.400.000	2	485.640.000	2	544.204.000		
4.01.03.1.02.0002 - Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		241.576.500		
Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan (Dokumen)	2	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	1	241.576.500		
4.01.03.1.03 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				940.000.000		1.084.000.000		1.242.400.000		1.416.640.000		1.608.304.000		
Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	1	2	940.000.000	2	1.084.000.000	2	1.242.400.000	2	1.416.640.000	2	1.608.304.000		
	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.03.1.03.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah				440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		644.204.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (Dokumen)	1	2	440.000.000	2	484.000.000	2	532.400.000	2	585.640.000	2	644.204.000		
4.01.03.1.03.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				500.000.000		600.000.000		710.000.000		831.000.000		964.100.000		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi (Laporan)	1	1	500.000.000	1	600.000.000	1	710.000.000	1	831.000.000	1	964.100.000		
4.01.04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				32.839.191.764		36.205.209.920		37.985.470.416		39.884.743.937		41.878.981.134		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental Spiritual yangÂ Ditindaklanjuti (%)	73	80	32.839.191.764	83	36.205.209.920	85	37.985.470.416	87	39.884.743.937	90	41.878.981.134	4.01.2.23.2.24.01.00 01 - Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.01.04.1.01 - Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual				3.825.000.000		4.207.500.000		4.628.250.000		5.091.075.000		5.600.182.500		
Persentase Pengembangan Mental Spiritual yang difasilitasi	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	5	6	3.825.000.000	6	4.207.500.000	6	4.628.250.000	6	5.091.075.000	6	5.600.182.500		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.04.1.01.0001 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				3.120.000.000		3.432.000.000		3.775.200.000		4.152.720.000		4.567.992.000		
Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola (Unit)	100	100	3.120.000.000	100	3.432.000.000	100	3.775.200.000	100	4.152.720.000	100	4.567.992.000		
4.01.04.1.01.0002 - Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				705.000.000		775.500.000		853.050.000		938.355.000		1.032.190.500		
Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi (Lembaga)	5	6	705.000.000	6	775.500.000	6	853.050.000	6	938.355.000	6	1.032.190.500		
4.01.04.1.02 - Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar				29.014.191.764		31.997.709.920		33.357.220.416		34.793.668.937		36.278.798.634		
Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	1	1	29.014.191.764	1	31.997.709.920	1	33.357.220.416	1	34.793.668.937	1	36.278.798.634		
4.01.04.1.02.0003 - Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				29.014.191.764		31.997.709.920		33.357.220.416		34.793.668.937		36.278.798.634		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	1	1	29.014.191.764	1	31.997.709.920	1	33.357.220.416	1	34.793.668.937	1	36.278.798.634		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				6.544.055.989,00		8.235.367.232,00		8.753.382.613,00		12.050.674.819,00		12.554.090.785,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.951.063.828,00		4.051.063.828,00		4.171.570.893,00		7.021.570.893,00		7.171.570.893,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Keseekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	81	81,5	2.951.063.828,00	82	4.051.063.828,00	82,5	4.171.570.893,00	82,5	7.021.570.893,00	83	7.171.570.893,00	4.01.0.00.0.00.01.00 04 - Biro Hukum	
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.630.977.687,00		2.308.789.476,00		2.361.808.298,00		3.944.974.482,00		4.040.083.185,00		
Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	1.630.977.687,00	2	2.308.789.476,00	2	2.361.808.298,00	2	3.944.974.482,00	2	4.040.083.185,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				19.366.710,00		25.176.723,00		25.176.723,00		42.800.429,00		42.800.429,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	19.366.710,00	1	25.176.723,00	1	25.176.723,00	1	42.800.429,00	1	42.800.429,00		
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.359.456.987,00		1.767.294.083,00		1.820.312.905,00		3.024.432.314,00		3.075.653.930,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	1.359.456.987,00	2	1.767.294.083,00	2	1.820.312.905,00	2	3.024.432.314,00	2	3.075.653.930,00		
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.089.990,00		15.716.987,00		19.716.987,00		26.718.878,00		28.054.822,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	12.089.990,00	2	15.716.987,00	2	19.716.987,00	2	26.718.878,00	2	28.054.822,00		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				240.064.000,00		500.601.683,00		496.601.683,00		851.022.861,00		893.574.004,00		
Konsultasi SKPD														
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	240.064.000,00	1	500.601.683,00	1	496.601.683,00	1	851.022.861,00	1	893.574.004,00		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.320.086.141,00		1.742.274.352,00		1.809.762.595,00		3.076.596.411,00		3.131.487.708,00		
Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	120	120	1.320.086.141,00	120	1.742.274.352,00	120	1.809.762.595,00	120	3.076.596.411,00	120	3.131.487.708,00		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13			13			13		13			
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.254.207.141,00		1.630.469.283,00		1.694.603.374,00		2.880.825.735,00		2.925.928.499,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	13	1.254.207.141,00	13	1.630.469.283,00	13	1.694.603.374,00	13	2.880.825.735,00	13	2.925.928.499,00		
4.01.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1.760.000,00		2.464.000,00		2.537.920,00		4.314.464,00		4.530.187,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	20	1.760.000,00	20	2.464.000,00	20	2.537.920,00	20	4.314.464,00	20	4.530.187,00		
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				64.119.000,00		109.341.069,00		112.621.301,00		191.456.212,00		201.029.022,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	120	120	64.119.000,00	120	109.341.069,00	120	112.621.301,00	120	191.456.212,00	120	201.029.022,00		
4.01.05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				3.592.992.161,00		4.184.303.404,00		4.581.811.720,00		5.029.103.926,00		5.382.519.892,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan, Pelayanan Hukum dan HAM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum (%)	100	100	3.592.992.161,00	100	4.184.303.404,00	100	4.581.811.720,00	100	5.029.103.926,00	100	5.382.519.892,00	4.01.0.00.0.00.01.00 04 - Biro Hukum	
4.01.05.1.01 - Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan				1.634.240.568,00		1.846.215.592,00		1.993.912.840,00		2.193.304.124,00		2.319.856.106,00		
Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	1.000	1.000	1.634.240.568,00	1.000	1.846.215.592,00	1.000	1.993.912.840,00	1.000	2.193.304.124,00	1.000	2.319.856.106,00		
	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	45	45		45		45		45		45			
	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	150	150		175		200		225		250			
4.01.05.1.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				1.052.582.292,00		1.206.391.489,00		1.302.902.808,00		1.433.193.090,00		1.498.936.188,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun (Dokumen)	45	45	1.052.582.292,00	45	1.206.391.489,00	45	1.302.902.808,00	45	1.433.193.090,00	45	1.498.936.188,00		
4.01.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				102.149.284,00		112.364.212,00		121.353.349,00		133.488.684,00		144.167.779,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun (Dokumen)	1.000	1.000	102.149.284,00	1.000	112.364.212,00	1.000	121.353.349,00	1.000	133.488.684,00	1.000	144.167.779,00		
4.01.05.1.01.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				149.700.392,00		164.670.431,00		177.844.066,00		195.628.472,00		211.278.750,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya (Dokumen)	50	50	149.700.392,00	50	164.670.431,00	50	177.844.066,00	50	195.628.472,00	50	211.278.750,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.05.1.01.0004 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				329.808.600,00		362.789.460,00		391.812.617,00		430.993.878,00		465.473.389,00		
Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi (Dokumen)	150	150	329.808.600,00	175	362.789.460,00	200	391.812.617,00	225	430.993.878,00	250	465.473.389,00		
4.01.05.1.02 - Fasilitasi Bantuan Hukum				1.958.751.593,00		2.338.087.812,00		2.587.898.880,00		2.835.799.802,00		3.062.663.786,00		
Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	10	18	1.958.751.593,00	18	2.338.087.812,00	18	2.587.898.880,00	18	2.835.799.802,00	18	3.062.663.786,00		
	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	39	43		43		43		43		43			
4.01.05.1.02.0001 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				1.834.610.593,00		2.201.532.712,00		2.437.688.270,00		2.670.568.131,00		2.884.213.581,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	39	43	1.834.610.593,00	43	2.201.532.712,00	43	2.437.688.270,00	43	2.670.568.131,00	43	2.884.213.581,00		
4.01.05.1.02.0002 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				124.141.000,00		136.555.100,00		150.210.610,00		165.231.671,00		178.450.205,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan (Kasus)	10	18	124.141.000,00	18	136.555.100,00	18	150.210.610,00	18	165.231.671,00	18	178.450.205,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				4.396.920.980,00		5.803.161.528,00		6.159.031.390,00		8.959.443.886,00		9.292.478.297,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.536.107.573,00		3.636.107.573,00		3.786.107.573,00		6.354.867.100,00		6.504.867.100,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Keseekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	82	83	2.536.107.573,00	84	3.636.107.573,00	84	3.786.107.573,00	84	6.354.867.100,00	84	6.504.867.100,00	4.01.2.23.2.24.01.00 07 - Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.000.000,00		14.250.000,00		14.500.000,00		18.000.000,00		25.099.871,00		
Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	14.000.000,00	8	14.250.000,00	8	14.500.000,00	8	18.000.000,00	8	25.099.871,00		
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.000.000,00		14.250.000,00		14.500.000,00		18.000.000,00		25.099.871,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	14.000.000,00	8	14.250.000,00	8	14.500.000,00	8	18.000.000,00	8	25.099.871,00		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.748.257.563,00		2.580.650.073,00		2.684.279.323,00		5.156.824.400,00		5.263.039.561,00		
Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	1.748.257.563,00	12	2.580.650.073,00	12	2.684.279.323,00	12	5.156.824.400,00	12	5.263.039.561,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	9	9		9		9		9					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.537.807.563,00		2.351.259.573,00		2.431.949.773,00		4.675.144.750,00		4.542.659.225,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	1.537.807.563,00	12	2.351.259.573,00	12	2.431.949.773,00	12	4.675.144.750,00	12	4.542.659.225,00		
4.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				37.950.000,00		41.365.500,00		45.502.050,00		181.169.370,00		282.638.252,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	37.950.000,00	1	41.365.500,00	1	45.502.050,00	1	181.169.370,00	1	282.638.252,00		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				172.500.000,00		188.025.000,00		206.827.500,00		300.510.280,00		437.742.084,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	9	9	172.500.000,00	9	188.025.000,00	9	206.827.500,00	9	300.510.280,00	9	437.742.084,00		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				773.850.010,00		1.041.207.500,00		1.087.328.250,00		1.180.042.700,00		1.216.727.668,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	185	185	773.850.010,00	185	1.041.207.500,00	185	1.087.328.250,00	185	1.180.042.700,00	185	1.216.727.668,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	37	37		37		37		37		37				
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				632.500.000,00		889.425.000,00		920.367.500,00		996.385.875,00		1.014.705.168,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	37	37	632.500.000,00	37	889.425.000,00	37	920.367.500,00	37	996.385.875,00	37	1.014.705.168,00			
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				141.350.010,00		151.782.500,00		166.960.750,00		183.656.825,00		202.022.500,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	185	185	141.350.010,00	185	151.782.500,00	185	166.960.750,00	185	183.656.825,00	185	202.022.500,00			
4.01.06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				892.420.001,00		1.039.288.671,00		1.138.020.968,00		1.249.118.486,00		1.336.899.217,00			
Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti (%)	100	100	892.420.001,00	100	1.039.288.671,00	100	1.138.020.968,00	100	1.249.118.486,00	100	1.336.899.217,00	4.01.2.23.2.24.01.00 07 - Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian		
4.01.06.1.01 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian				322.473.335,00		371.429.557,00		391.560.332,00		436.935.349,00		467.223.722,00			
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	2	2	322.473.335,00	2	371.429.557,00	2	391.560.332,00	2	436.935.349,00	2	467.223.722,00			
4.01.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				322.473.335,00		371.429.557,00		391.560.332,00		436.935.349,00		467.223.722,00			
Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Dokumen)	2	2	322.473.335,00	2	371.429.557,00	2	391.560.332,00	2	436.935.349,00	2	467.223.722,00			
4.01.06.1.02 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam				322.473.333,00		371.429.557,00		391.560.332,00		436.935.349,00		467.223.722,00			
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	2	2	322.473.333,00	2	371.429.557,00	2	391.560.332,00	2	436.935.349,00	2	467.223.722,00			
4.01.06.1.02.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				322.473.333,00		371.429.557,00		391.560.332,00		436.935.349,00		467.223.722,00			
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (Dokumen)	2	2	322.473.333,00	2	371.429.557,00	2	391.560.332,00	2	436.935.349,00	2	467.223.722,00			
4.01.06.1.03 - Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD				247.473.333,00		296.429.557,00		354.900.304,00		375.247.788,00		402.451.773,00			
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	1	1	247.473.333,00	1	296.429.557,00	1	354.900.304,00	1	375.247.788,00	1	402.451.773,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.06.1.03.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				247.473.333,00		296.429.557,00		354.900.304,00		375.247.788,00		402.451.773,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Dokumen)	1	1	247.473.333,00	1	296.429.557,00	1	354.900.304,00	1	375.247.788,00	1	402.451.773,00		
4.01.07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				853.541.591,00		994.011.906,00		1.088.442.916,00		1.194.700.445,00		1.278.657.005,00		
Meningkatnya Kualitas Pengadaaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (%)	85	85	853.541.591,00	85	994.011.906,00	90	1.088.442.916,00	90	1.194.700.445,00	90	1.278.657.005,00	4.01.2.23.2.24.01.00 07 - Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	
4.01.07.1.01 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				237.864.392,00		305.835.694,00		342.096.261,00		383.489.926,00		414.026.154,00		
Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12	237.864.392,00	12	305.835.694,00	12	342.096.261,00	12	383.489.926,00	12	414.026.154,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12		12		12		12					
4.01.07.1.01.0001 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				78.269.764,00		100.875.951,00		112.909.338,00		126.651.089,00		136.770.887,00		
Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12	78.269.764,00	12	100.875.951,00	12	112.909.338,00	12	126.651.089,00	12	136.770.887,00		
4.01.07.1.01.0002 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				98.213.364,00		121.816.724,00		134.897.157,00		149.738.298,00		161.012.457,00		
Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	1	1	98.213.364,00	1	121.816.724,00	1	134.897.157,00	1	149.738.298,00	1	161.012.457,00		
4.01.07.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaaan Barang dan Jasa				61.381.264,00		83.143.019,00		94.289.766,00		107.100.539,00		116.242.810,00		
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12	61.381.264,00	12	83.143.019,00	12	94.289.766,00	12	107.100.539,00	12	116.242.810,00		
4.01.07.1.02 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				331.667.906,00		333.888.376,00		353.375.634,00		374.282.075,00		394.515.281,00		
Jumlah Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	12	12	331.667.906,00	12	333.888.376,00	12	353.375.634,00	12	374.282.075,00	12	394.515.281,00		
	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12		12		12		12					
4.01.07.1.02.0001 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				188.333.953,00		190.569.188,00		201.492.567,00		213.187.600,00		224.606.531,00		
Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (Laporan)	12	12	188.333.953,00	12	190.569.188,00	12	201.492.567,00	12	213.187.600,00	12	224.606.531,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.07.1.02.0002 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				143.333.953,00		143.319.188,00		151.883.067,00		161.094.475,00		169.908.750,00		
Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Laporan)	12	12	143.333.953,00	12	143.319.188,00	12	151.883.067,00	12	161.094.475,00	12	169.908.750,00		
4.01.07.1.03 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				284.009.293,00		354.287.836,00		392.971.021,00		436.928.444,00		470.115.570,00		
Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	284.009.293,00	1	354.287.836,00	1	392.971.021,00	1	436.928.444,00	1	470.115.570,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	90	90		90		90		90					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1		1		1		1					
4.01.07.1.03.0001 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				134.669.764,00		160.095.944,00		175.090.338,00		191.961.166,00		205.325.440,00		
Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	90	90	134.669.764,00	90	160.095.944,00	90	175.090.338,00	90	191.961.166,00	90	205.325.440,00		
4.01.07.1.03.0002 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				64.669.765,00		86.595.948,00		97.915.345,00		110.907.389,00		120.240.003,00		
Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	64.669.765,00	1	86.595.948,00	1	97.915.345,00	1	110.907.389,00	1	120.240.003,00		
4.01.07.1.03.0003 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				84.669.764,00		107.595.944,00		119.965.338,00		134.059.889,00		144.550.127,00		
Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	1	1	84.669.764,00	1	107.595.944,00	1	119.965.338,00	1	134.059.889,00	1	144.550.127,00		
4.01.08 - PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				114.851.815,00		133.753.378,00		146.459.933,00		160.757.855,00		172.054.975,00		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku (%)	87	87	114.851.815,00	87	133.753.378,00	90	146.459.933,00	90	160.757.855,00	90	172.054.975,00	4.01.2.23.2.24.01.00 07 - Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	
4.01.08.1.01 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah				57.425.908,00		66.876.689,00		73.228.466,00		80.387.916,00		86.027.487,00		
Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	1	1	57.425.908,00	1	66.876.689,00	1	73.228.466,00	1	80.387.916,00	1	86.027.487,00		
4.01.08.1.01.0001 - Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				57.425.908,00		66.876.689,00		73.228.466,00		80.387.916,00		86.027.487,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan)	1	1	57.425.908,00	1	66.876.689,00	1	73.228.466,00	1	80.387.916,00	1	86.027.487,00		
4.01.08.1.02 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				57.425.907,00		66.876.689,00		73.231.467,00		80.369.939,00		86.027.488,00		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	57.425.907,00	1	66.876.689,00	1	73.231.467,00	1	80.369.939,00	1	86.027.488,00		
4.01.08.1.02.0002 - Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				57.425.907,00		66.876.689,00		73.231.467,00		80.369.939,00		86.027.488,00		
Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	1	1	57.425.907,00	1	66.876.689,00	1	73.231.467,00	1	80.369.939,00	1	86.027.488,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				1.255.000.000,00		1.380.500.000,00		1.518.550.000,00		1.670.405.000,00		1.837.445.500,00		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.030.000.000,00		1.133.000.000,00		1.246.300.000,00		1.370.930.000,00		1.508.023.000,00		
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Provinsi Bali	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan Baik (%)	60	70	1.030.000.000,00	72	1.133.000.000,00	74	1.246.300.000,00	76	1.370.930.000,00	78	1.508.023.000,00	4.01.2.23.2.24.01.00 05 - Biro Organisasi	
2.23.02.1.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi				888.928.789,00		968.000.000,00		1.064.800.000,00		1.171.280.000,00		1.288.408.000,00		
Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	1.000	1.000	888.928.789,00	1.000	968.000.000,00	1.000	1.064.800.000,00	1.000	1.171.280.000,00	1.000	1.288.408.000,00		
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	0	1		1		1		1		0			
	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	80	50		50		50		50		50			
2.23.02.1.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				254.464.394,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	80	50	254.464.394,00	50	275.000.000,00	50	302.500.000,00	50	332.750.000,00	50	366.025.000,00		
2.23.02.1.01.0009 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka				254.464.395,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	1.000	1.000	254.464.395,00	1.000	275.000.000,00	1.000	302.500.000,00	1.000	332.750.000,00	1.000	366.025.000,00		
2.23.02.1.01.0011 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat				110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		161.051.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Dokumen)	0	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00	0	161.051.000,00		
2.23.02.1.01.0016 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				270.000.000,00		297.000.000,00		326.700.000,00		359.370.000,00		395.307.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	1	1	270.000.000,00	1	297.000.000,00	1	326.700.000,00	1	359.370.000,00	1	395.307.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02.1.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi				141.071.211,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		
Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	15	10	141.071.211,00	10	165.000.000,00	10	181.500.000,00	10	199.650.000,00	10	219.615.000,00		
2.23.02.1.02.0004 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				141.071.211,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan (Perpustakaan)	15	10	141.071.211,00	10	165.000.000,00	10	181.500.000,00	10	199.650.000,00	10	219.615.000,00		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				225.000.000,00		247.500.000,00		272.250.000,00		299.475.000,00		329.422.500,00		
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno di Provinsi Bali	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun (%)	5	5	225.000.000,00	7	247.500.000,00	9	272.250.000,00	11	299.475.000,00	13	329.422.500,00	4.01.2.23.2.24.01.005 - Biro Organisasi	
2.23.03.1.01 - Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi				112.500.000,00		123.750.000,00		136.125.000,00		149.737.500,00		164.711.250,00		
Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	300	300	112.500.000,00	300	123.750.000,00	300	136.125.000,00	300	149.737.500,00	300	164.711.250,00		
2.23.03.1.01.0001 - Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				112.500.000,00		123.750.000,00		136.125.000,00		149.737.500,00		164.711.250,00		
Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR (Eksemplar)	300	300	112.500.000,00	300	123.750.000,00	300	136.125.000,00	300	149.737.500,00	300	164.711.250,00		
2.23.03.1.03 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi				112.500.000,00		123.750.000,00		136.125.000,00		149.737.500,00		164.711.250,00		
Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	10	10	112.500.000,00	10	123.750.000,00	10	136.125.000,00	10	149.737.500,00	10	164.711.250,00		
2.23.03.1.03.0003 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				112.500.000,00		123.750.000,00		136.125.000,00		149.737.500,00		164.711.250,00		
Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	10	10	112.500.000,00	10	123.750.000,00	10	136.125.000,00	10	149.737.500,00	10	164.711.250,00		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				3.371.079.315,00		4.597.872.414,00		4.833.108.930,00		7.779.020.456,00		8.004.802.382,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.600.644.785,00		3.700.644.785,00		3.850.644.785,00		6.700.644.785,00		6.850.644.785,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	85	87	2.600.644.785,00	88	3.700.644.785,00	88	3.850.644.785,00	88	6.700.644.785,00	88	6.850.644.785,00	4.01.2.23.2.24.01.005 - Biro Organisasi	
4.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.310.000,00	1	14.641.000,00		
4.01.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.310.000,00	1	14.641.000,00		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.511.742.000,00		2.163.888.204,00		2.245.044.000,00		3.950.910.000,00		4.039.323.500,00		
Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1.511.742.000,00	1	2.163.888.204,00	1	2.245.044.000,00	1	3.950.910.000,00	1	4.039.323.500,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15		15		15		15		15			
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				118.914.000,00		295.378.000,00		282.498.000,00		802.535.000,00		776.096.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	1	118.914.000,00	1	295.378.000,00	1	282.498.000,00	1	802.535.000,00	1	776.096.000,00		
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				943.914.000,00		1.210.132.204,00		1.280.748.000,00		1.906.610.000,00		1.993.978.500,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	943.914.000,00	15	1.210.132.204,00	15	1.280.748.000,00	15	1.906.610.000,00	15	1.993.978.500,00		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				448.914.000,00		658.378.000,00		681.798.000,00		1.241.765.000,00		1.269.249.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	448.914.000,00	1	658.378.000,00	1	681.798.000,00	1	1.241.765.000,00	1	1.269.249.000,00		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.078.902.785,00		1.525.756.581,00		1.593.500.785,00		2.736.424.785,00		2.796.680.285,00		
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	130	117	1.078.902.785,00	117	1.525.756.581,00	117	1.593.500.785,00	117	2.736.424.785,00	117	2.796.680.285,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	13		13		13		13		13			
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				894.450.000,00		1.153.378.000,00		1.226.298.000,00		1.840.715.000,00		1.918.094.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	15	13	894.450.000,00	13	1.153.378.000,00	13	1.226.298.000,00	13	1.840.715.000,00	13	1.918.094.000,00		
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				184.452.785,00		372.378.581,00		367.202.785,00		895.709.785,00		878.586.285,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN					
			2026		2027		2028		2029		2030								
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	130	117	184.452.785,00	117	372.378.581,00	117	367.202.785,00	117	895.709.785,00	117	878.586.285,00							
4.01.02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				770.434.530,00		897.227.629,00		982.464.145,00		1.078.375.671,00		1.154.157.597,00							
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik (%)	87	91	770.434.530,00	93	897.227.629,00	95	982.464.145,00	97	1.078.375.671,00	99	1.154.157.597,00	4.01.2.23.2.24.01.00 05 - Biro Organisasi						
4.01.02.1.01 - Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan				229.907.770,00		272.964.225,00		300.406.000,00		345.968.000,00		386.862.000,00							
Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	29	29	229.907.770,00	29	272.964.225,00	29	300.406.000,00	29	345.968.000,00	29	386.862.000,00							
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1										1			1	1	1	
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1																
4.01.02.1.01.0001 - Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi				63.557.559,00		77.141.969,00		86.202.000,00		101.206.000,00		114.654.000,00							
Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	63.557.559,00	1	77.141.969,00	1	86.202.000,00	1	101.206.000,00	1	114.654.000,00							
4.01.02.1.01.0002 - Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				55.710.541,00		68.834.305,00		77.952.000,00		92.956.000,00		106.404.000,00							
Terlaksananya Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	55.710.541,00	1	68.834.305,00	1	77.952.000,00	1	92.956.000,00	1	106.404.000,00							
4.01.02.1.01.0003 - Penataan Analisis Jabatan				110.639.670,00		126.987.951,00		136.252.000,00		151.806.000,00		165.804.000,00							
Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan (Dokumen)	29	29	110.639.670,00	29	126.987.951,00	29	136.252.000,00	29	151.806.000,00	29	165.804.000,00							
4.01.02.1.02 - Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja				540.526.760,00		624.263.404,00		682.058.145,00		732.407.671,00		767.295.597,00							
Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	1	540.526.760,00	1	624.263.404,00	1	682.058.145,00	1	732.407.671,00	1	767.295.597,00							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	2	2												2	2	1	3	4
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1																
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	3	3																
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4	4																
4.01.02.1.02.0001 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				149.874.762,00		168.526.264,00		177.471.000,00		193.156.000,00		199.204.000,00							
Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	149.874.762,00	1	168.526.264,00	1	177.471.000,00	1	193.156.000,00	1	199.204.000,00							
4.01.02.1.02.0002 - Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				138.104.235,00		156.075.884,00		165.371.000,00		178.056.000,00		187.632.500,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)	3	3	138.104.235,00	3	156.075.884,00	3	165.371.000,00	3	178.056.000,00	3	187.632.500,00		
4.01.02.1.02.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				41.972.398,00		58.016.158,00		73.521.000,00		76.306.000,00		82.304.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja (Laporan)	1	1	41.972.398,00	1	58.016.158,00	1	73.521.000,00	1	76.306.000,00	1	82.304.000,00		
4.01.02.1.02.0004 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				110.639.670,00		126.987.948,00		136.221.000,00		151.091.000,00		156.854.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan (Dokumen)	2	2	110.639.670,00	2	126.987.948,00	2	136.221.000,00	2	151.091.000,00	2	156.854.000,00		
4.01.02.1.02.0005 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				99.935.695,00		114.657.150,00		129.474.145,00		133.798.671,00		141.301.097,00		
Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Dokumen)	4	4	99.935.695,00	4	114.657.150,00	4	129.474.145,00	4	133.798.671,00	4	141.301.097,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				449.040.991,00		489.663.489,00		502.060.379,00		500.975.672,00		487.437.552,00			
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				449.040.991,00		489.663.489,00		502.060.379,00		500.975.672,00		487.437.552,00			
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Keseekretariatan	Nilai Evaluasi Kearsipan (Nilai)	63	65	449.040.991,00	65	489.663.489,00	65,5	502.060.379,00	66	500.975.672,00	66,5	487.437.552,00	4.01.2.23.2.24.01.00 03 - Biro Umum dan Protokol		
	Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang Tertib Arsip (%)	100	60		65		70		75		80				
2.24.02.1.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi				339.040.991,00		378.163.489,00		386.060.379,00		384.975.672,00		374.437.552,00			
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	0	45	339.040.991,00	45	378.163.489,00	45	386.060.379,00	45	384.975.672,00	45	374.437.552,00			
	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	0	42		42		42		42		42				
	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	0	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
	Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)	0	2		2		2		2		2				
2.24.02.1.01.0004 - Penyusutan Arsip Dinamis				40.000.000,00		40.500.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		41.000.000,00			
Terlaksananya Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan (Arsip)	0	1.000	40.000.000,00	1.000	40.500.000,00	1.000	42.000.000,00	1.000	42.000.000,00	1.000	41.000.000,00			
2.24.02.1.01.0006 - Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis				119.040.991,00		139.540.991,00		141.437.881,00		140.353.174,00		135.815.054,00			
Terciptanya dan Terpeliharanya Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis (Arsip)	1.000	1.000	119.040.991,00	1.000	139.540.991,00	1.000	141.437.881,00	1.000	140.353.174,00	1.000	135.815.054,00			
2.24.02.1.01.0008 - Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi				60.000.000,00		60.500.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		61.000.000,00			
Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis (Instansi)	0	42	60.000.000,00	42	60.500.000,00	42	62.000.000,00	42	62.000.000,00	42	61.000.000,00			
2.24.02.1.01.0011 - Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				40.000.000,00		40.500.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		41.000.000,00			
Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan (Laporan)	0	2	40.000.000,00	2	40.500.000,00	2	42.000.000,00	2	42.000.000,00	2	41.000.000,00			
2.24.02.1.01.0012 - Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				80.000.000,00		97.122.498,00		98.622.498,00		98.622.498,00		95.622.498,00			
Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan (Lembaga)	0	45	80.000.000,00	45	97.122.498,00	45	98.622.498,00	45	98.622.498,00	45	95.622.498,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.02.1.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi				40.000.000,00		40.500.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		41.000.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	0	10	40.000.000,00	10	40.500.000,00	10	42.000.000,00	10	42.000.000,00	10	41.000.000,00		
2.24.02.1.02.0005 - Akuisisi Arsip Statis				40.000.000,00		40.500.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		41.000.000,00		
Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi (Arsip)	0	10	40.000.000,00	10	40.500.000,00	10	42.000.000,00	10	42.000.000,00	10	41.000.000,00		
2.24.02.1.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi				70.000.000,00		71.000.000,00		74.000.000,00		74.000.000,00		72.000.000,00		
Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	400	250	70.000.000,00	250	71.000.000,00	250	74.000.000,00	250	74.000.000,00	250	72.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	45	45		45		45		45					
2.24.02.1.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				30.000.000,00		30.500.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		31.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN (Pengguna)	400	250	30.000.000,00	250	30.500.000,00	250	32.000.000,00	250	32.000.000,00	250	31.000.000,00		
2.24.02.1.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				40.000.000,00		40.500.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		41.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (Laporan)	45	45	40.000.000,00	45	40.500.000,00	45	42.000.000,00	45	42.000.000,00	45	41.000.000,00		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				69.800.564.515,00		71.560.135.789,00		71.710.135.789,00		74.710.135.789,00		74.312.690.615,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				69.800.564.515,00		71.560.135.789,00		71.710.135.789,00		74.710.135.789,00		74.312.690.615,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	83	83	69.800.564.515,00	83	71.560.135.789,00	83	71.710.135.789,00	83	74.710.135.789,00	83	74.312.690.615,00	4.01.2.23.2.24.01.003 - Biro Umum dan Protokol	
4.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				413.080.028,00		413.080.028,00		413.080.028,00		413.080.028,00		413.080.028,00		
Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00		
4.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				413.080.028,00		413.080.028,00		413.080.028,00		413.080.028,00		413.080.028,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00	100	413.080.028,00		
4.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				385.436.464,00		385.436.464,00		385.436.464,00		485.436.464,00		585.436.464,00		
Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	385.436.464,00	12	385.436.464,00	12	385.436.464,00	12	485.436.464,00	12	585.436.464,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				385.436.464,00		385.436.464,00		385.436.464,00		485.436.464,00		585.436.464,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	385.436.464,00	12	385.436.464,00	12	385.436.464,00	12	485.436.464,00	12	585.436.464,00		
4.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				190.398.532,00		190.398.532,00		190.398.532,00		190.398.532,00		190.398.532,00		
Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	21	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00		
4.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				190.398.532,00		190.398.532,00		190.398.532,00		190.398.532,00		190.398.532,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	21	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00	21	190.398.532,00		
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				13.360.659.943,00		15.160.659.943,00		15.160.659.943,00		17.018.659.944,00		16.979.214.770,00		
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	12	13.360.659.943,00	12	15.160.659.943,00	12	15.160.659.943,00	12	17.018.659.944,00	12	16.979.214.770,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				620.027.020,00		620.027.020,00		620.027.020,00		620.027.020,00		620.027.020,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	620.027.020,00	2	620.027.020,00	2	620.027.020,00	2	620.027.020,00	2	620.027.020,00		
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.003.505.783,00		2.502.509.019,00		2.502.509.019,00		2.507.509.019,00		2.512.509.019,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	5	2.003.505.783,00	5	2.502.509.019,00	5	2.502.509.019,00	5	2.507.509.019,00	5	2.512.509.019,00		
4.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				6.059.833.477,00		6.559.833.477,00		6.559.833.477,00		6.659.833.477,00		6.759.833.477,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	6.059.833.477,00	12	6.559.833.477,00	12	6.559.833.477,00	12	6.659.833.477,00	12	6.759.833.477,00		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.303.252.134,00		5.104.248.898,00		5.104.248.898,00		6.852.248.899,00		6.702.803.725,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	4.303.252.134,00	12	5.104.248.898,00	12	5.104.248.898,00	12	6.852.248.899,00	12	6.702.803.725,00		
4.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				374.041.529,00		374.041.529,00		374.041.529,00		379.041.529,00		384.041.529,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	12	374.041.529,00	12	374.041.529,00	12	374.041.529,00	12	379.041.529,00	12	384.041.529,00		
4.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				14.328.674.720,00		14.288.245.994,00		14.288.245.994,00		14.328.245.994,00		13.868.245.994,00		
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	14.328.674.720,00	12	14.288.245.994,00	12	14.288.245.994,00	12	14.328.245.994,00	12	13.868.245.994,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.069.469.360,00		2.069.469.360,00		2.069.469.360,00		2.089.469.360,00		2.109.469.360,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.069.469.360,00	12	2.069.469.360,00	12	2.069.469.360,00	12	2.089.469.360,00	12	2.109.469.360,00		
4.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6.991.733.308,00		6.951.304.582,00		6.951.304.582,00		6.961.304.582,00		6.471.304.582,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	6.991.733.308,00	12	6.951.304.582,00	12	6.951.304.582,00	12	6.961.304.582,00	12	6.471.304.582,00		
4.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.267.472.052,00		5.267.472.052,00		5.267.472.052,00		5.277.472.052,00		5.287.472.052,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.267.472.052,00	12	5.267.472.052,00	12	5.267.472.052,00	12	5.277.472.052,00	12	5.287.472.052,00		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.472.967.023,00		12.472.967.023,00		12.472.967.023,00		12.472.967.023,00		12.472.967.023,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	141	136	12.472.967.023,00	136	12.472.967.023,00	136	12.472.967.023,00	136	12.472.967.023,00	136	12.472.967.023,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25	12		12		12		12		12			
4.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6.518.073.142,00		6.518.073.142,00		6.518.073.142,00		6.518.073.142,00		6.518.073.142,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	141	136	6.518.073.142,00	136	6.518.073.142,00	136	6.518.073.142,00	136	6.518.073.142,00	136	6.518.073.142,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.954.893.881,00		5.954.893.881,00		5.954.893.881,00		5.954.893.881,00		5.954.893.881,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25	12	5.954.893.881,00	12	5.954.893.881,00	12	5.954.893.881,00	12	5.954.893.881,00	12	5.954.893.881,00		
4.01.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		
Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	2	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00		
4.01.01.1.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		6.084.841.034,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/ Bulan)	2	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00	2	6.084.841.034,00		
4.01.01.1.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				22.564.506.771,00		22.564.506.771,00		22.714.506.771,00		23.716.506.770,00		23.718.506.770,00		
Meningkatnya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	22.564.506.771,00	1	22.564.506.771,00	1	22.714.506.771,00	1	23.716.506.770,00	1	23.718.506.770,00		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	40	40		40		40		40					
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	47	47		47		47		47					
4.01.01.1.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				13.668.985.825,00		13.668.985.825,00		13.818.985.825,00		14.318.985.824,00		14.318.985.824,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	47	47	13.668.985.825,00	47	13.668.985.825,00	47	13.818.985.825,00	47	14.318.985.824,00	47	14.318.985.824,00		
4.01.01.1.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				8.491.023.848,00		8.491.023.848,00		8.491.023.848,00		8.991.023.848,00		8.991.023.848,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	40	40	8.491.023.848,00	40	8.491.023.848,00	40	8.491.023.848,00	40	8.991.023.848,00	40	8.991.023.848,00		
4.01.01.1.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				404.497.098,00		404.497.098,00		404.497.098,00		406.497.098,00		408.497.098,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	1	1	404.497.098,00	1	404.497.098,00	1	404.497.098,00	1	406.497.098,00	1	408.497.098,00		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				27.732.433.474,00		29.119.055.148,00		30.575.007.905,00		32.103.758.300,00		33.708.946.215,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				27.732.433.474,00		29.119.055.148,00		30.575.007.905,00		32.103.758.300,00		33.708.946.215,00		
Meningkatnya kepuasan layanan informasi publik dan layanan keprotokolan	Persentase Kepuasan Pimpinan Terhadap Layanan Keprotokolan (%)	0	91	20.923.858.964,00	92	21.970.051.912,00	93	23.068.554.508,00	94	24.221.982.233,00	95	25.433.081.345,00	4.01.2.23.2.24.01.00 08 - Biro Humas dan Protokol	
	Persentase Informasi Publik yang tersampaikan dengan baik ke Masyarakat (%)	0	94		95		96		97		98			
4.01.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan				16.500.000.000,00		17.325.000.000,00		18.191.250.000,00		19.100.812.500,00		20.055.853.125,00		
Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	0	12	16.500.000.000,00	12	17.325.000.000,00	12	18.191.250.000,00	12	19.100.812.500,00	12	20.055.853.125,00		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	0	12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	0	36		36		36		36		36			
4.01.01.1.13.0001 - Penyiapan Materi Pimpinan				2.200.000.000,00		2.310.000.000,00		2.425.500.000,00		2.546.775.000,00		2.674.113.750,00		
Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan (Dokumen)	0	36	2.200.000.000,00	36	2.310.000.000,00	36	2.425.500.000,00	36	2.546.775.000,00	36	2.674.113.750,00		
4.01.01.1.13.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12.300.000.000,00		12.915.000.000,00		13.560.750.000,00		14.238.787.500,00		14.950.726.875,00		
Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	0	12	12.300.000.000,00	12	12.915.000.000,00	12	13.560.750.000,00	12	14.238.787.500,00	12	14.950.726.875,00		
4.01.01.1.13.0003 - Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				2.000.000.000,00		2.100.000.000,00		2.205.000.000,00		2.315.250.000,00		2.431.012.500,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan (Laporan)	0	12	2.000.000.000,00	12	2.100.000.000,00	12	2.205.000.000,00	12	2.315.250.000,00	12	2.431.012.500,00		
4.01.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan				4.423.858.964,00		4.645.051.912,00		4.877.304.508,00		5.121.169.733,00		5.377.228.220,00		
Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	0	12	4.423.858.964,00	12	4.645.051.912,00	12	4.877.304.508,00	12	5.121.169.733,00	12	5.377.228.220,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	0	12		12		12		12					
4.01.01.1.14.0002 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.800.000.000,00		1.890.000.000,00		1.984.500.000,00		2.083.725.000,00		2.187.911.250,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Laporan)	0	12	1.800.000.000,00	12	1.890.000.000,00	12	1.984.500.000,00	12	2.083.725.000,00	12	2.187.911.250,00		
4.01.01.1.14.0003 - Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				2.623.858.964,00		2.755.051.912,00		2.892.804.508,00		3.037.444.733,00		3.189.316.970,00		
Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Laporan)	0	12	2.623.858.964,00	12	2.755.051.912,00	12	2.892.804.508,00	12	3.037.444.733,00	12	3.189.316.970,00		
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Keseekretariatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Nilai)	0	82	6.808.574.510,00	83	7.149.003.236,00	84	7.506.453.397,00	85	7.881.776.067,00	86	8.275.864.870,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.321.938.010,00		5.588.034.911,00		5.867.436.656,00		6.160.808.489,00		6.468.848.913,00		
Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	5.321.938.010,00	1	5.588.034.911,00	1	5.867.436.656,00	1	6.160.808.489,00	1	6.468.848.913,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	10		10		10		12					
4.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.363.500,00		14.031.675,00		14.733.259,00		15.469.921,00		16.243.418,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	13.363.500,00	1	14.031.675,00	1	14.733.259,00	1	15.469.921,00	1	16.243.418,00		
4.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.387.558.855,00		1.456.936.798,00		1.529.783.637,00		1.606.272.820,00		1.686.586.460,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	10	1.387.558.855,00	10	1.456.936.798,00	10	1.529.783.637,00	10	1.606.272.820,00	12	1.686.586.460,00		
4.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.921.015.655,00		4.117.066.438,00		4.322.919.760,00		4.539.065.748,00		4.766.019.035,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	3.921.015.655,00	12	4.117.066.438,00	12	4.322.919.760,00	12	4.539.065.748,00	12	4.766.019.035,00		
4.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.486.636.500,00		1.560.968.325,00		1.639.016.741,00		1.720.967.578,00		1.807.015.957,00		
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	43	1.486.636.500,00	43	1.560.968.325,00	45	1.639.016.741,00	50	1.720.967.578,00	55	1.807.015.957,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	17		18		20		22		25			
4.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.439.706.500,00		1.511.691.825,00		1.587.276.416,00		1.666.640.237,00		1.749.972.249,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	17	1.439.706.500,00	18	1.511.691.825,00	20	1.587.276.416,00	22	1.666.640.237,00	25	1.749.972.249,00		
4.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.930.000,00		49.276.500,00		51.740.325,00		54.327.341,00		57.043.708,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	43	46.930.000,00	43	49.276.500,00	45	51.740.325,00	50	54.327.341,00	55	57.043.708,00		